

SURAT KELUAR 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP. 103 / 2 / 7 / STJ / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara *E-Magazine*
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 20 Agustus 2024

Yth. General Manager Perum DAMRI Cabang Samarinda

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi. Indonesia. *E-Magazine* ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara secara daring, untuk *e-magazine* Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Kamis, 22 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tya [REDACTED].

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,



Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Nomor : IP.103 / 2 / 7 / STJ / 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : TRANSFORMASI TRANSPORTASI MENUJU IBU KOTA NEGARA BARU

1. DAMRI melayani perjalanan rute Balikpapan – IKN Nusantara. Mohon informasi secara detail terkait :
 - a. Data produksi: penumpang (jumlah, karakteristik), frekuensi perjalanan, waktu, tarif, dll
 - b. Bagaimana respon masyarakat dengan hadirnya layanan tersebut
 - c. Apa saja kendala/tantangan penyelenggaraan angkutan (berbagai aspek): infrastruktur (sarpras), regulasi/kebijakan/sistem, kondisi/karakteristik wilayah, karakteristik penumpang/budaya/masyarakat (local wisdom)
2. Pada 2022, operasional DAMRI rute IKN Nusantara sempat mengalami penolakan terkait titik pengangkutan dan karakteristik penumpang (mengangkut penumpang umum yang semestinya angkutan hanya untuk calon pekerja dan wisatawan ke IKN). Mohon dijelaskan terkait:
 - a. Apakah saat ini operasional DAMRI sudah dibuka kembali dan diterima masyarakat juga *stakeholder* terkait
 - b. Bagaimana sinergi DAMRI dengan *stakeholder* dalam menyediakan layanan bus yang aman dan selamat
3. Apa yang menjadi daya tarik atau ciri khas DAMRI Balikpapan – IKN Nusantara dibanding kompetitor lain dengan tujuan rute yang sama?
4. Selain rute IKN Nusantara, apakah DAMRI melayani rute lain dengan titik keberangkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian?
5. Apa yang menjadi harapan?
6. Mohon tambahan data pendukung terkait tema



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP. 103 / 2 / 10 / STJ / 2024

Jakarta, 20 Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Permohonan Liputan dan Wawancara
E-Magazine Transmedia Kementerian Perhubungan

Yth. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan

Kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia yang dimaksudkan sebagai sarana informasi lengkap dan mendalam terkait kebijakan serta isu strategis di dunia transportasi. *E-Magazine* Transmedia ini ditujukan kepada para *stakeholder* transportasi antara lain pemerintah daerah, BUMN, operator, pengamat transportasi, akademisi, dan masyarakat pengguna transportasi.

Pada edisi pertama tahun 2024, Tim Redaksi *e-magazine* Transmedia akan melaksanakan peliputan pada 21-23 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengulas transportasi pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk keberadaan Bandar Udara Sepinggang sebagai salah satu pintu masuk strategis IKN, dengan personil sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Arifatmi Hastuti NIP: 198410182009122002	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi
2.	Aditya Dwi Ardiandhini NIP: 19861219 202012 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Humas Ahli Pertama
3.	Rohani	-	Penulis Transmedia
4.	Septian Fajar Saputra	-	Fotografer Transmedia
5.	Jovita Alesandra Nathania	-	Pengelola Media Sosial Transmedia

Berkenaan dengan itu, guna kelancaran tugas dimaksud dimohon kiranya dapat membantu pelaksanaan kegiatan peliputan dan wawancara di wilayah kerja Saudara. Kami lampirkan pula *rundown* kegiatan dan daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat diakses melalui tautan <https://transmediakemenhub.id>. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdr. Tya (██████████).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sesditjen Perhubungan Udara.

Lampiran Surat Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik

Nomor : IP. 103 / 2 / 10 / STJ / 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

1. Belum siapnya Bandara VVIP IKN membuat pemerintah mengalihkan para tamu IKN termasuk VVIP ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian sementara waktu. Mohon dapat disampaikan dan dijelaskan dengan detail, terkait dengan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan yang telah dilakukan di Bandara SAMS dalam menyambut para tamu IKN.
2. Untuk menunjang transportasi melalui Bandara SAMS yang akan menuju IKN nantinya, program prioritas apa saja yang sedang/akan dilaksanakan Otban Wilayah VII Balikpapan? Apa saja capaian dan target kinerja saat ini dan kedepannya?
3. Mohon dapat dijelaskan, bagaimana konektivitas transportasi penghubung Bandara SAMS yang akan menuju IKN nantinya?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dan operasional dari setiap infrastruktur Bandara SAMS? Apakah seluruh sarana prasarana terbangun telah berfungsi/beroperasi secara optimal dan efektif?
5. Bagaimana implementasi regulasi, langkah, dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan protokol kesehatan di seluruh bandar udara di wilayah kerja Otban Wilayah VII Balikpapan?
6. Dalam mendukung IKN, mohon dapat dijelaskan langkah dan strategi apa saja yang dilakukan untuk mendukung ketersediaan SDM transportasi perhubungan yang andal, berkompeten, dan berdaya saing?
7. Hal lain yang ingin disampaikan mengenai penyelenggaraan transportasi udara dalam mendukung pembangunan IKN?

Terima kasih

**Rundown Liputan Majalah Transmedia Balikpapan
21-23 Agustus 2024**

No	Waktu	Lokasi	Kegiatan
Rabu, 21 Agustus 2024			
1	06.20 – 09.30	Jakarta - Balikpapan	Flight pagi menuju Balikpapan
2	10.00 – 11.00	Bandara Sepinggan	Liputan dan wawancara dengan EGM AP I
3	11.00 – 12.00	Kantor Otoritas Bandara	Wawancara dengan Kaotban
3	12.00 – 13.00		break ISHOMA
4	13.15 – 14.00	Kantor KSOP Balikpapan	Wawancara dengan Kepala KSOP
5	14.00 - selesai	Dermaga Sandy Jaya	Liputan kapal Pinisi di Dermaga Sandy Jaya
Kamis, 22 Agustus 2024			
1	08.00 – 10.00	Kantor BPTD Balikpapan	Wawancara Kepala BPTD
2	10.00 – 12.00		Perjalanan dari Terminal Batu Ampar Balikpapan – IKN dengan Bus Antarmoda
3	12.00 – 13.00	IKN	break ISHOMA
4	13.00 – 17.00	IKN	Liputan IKN
5	17.30 – 19.30		Perjalanan IKN- Balikpapan
Jumat, 23 Agustus 2024			
1	08.00-12.00	Kota Balikpapan	Liputan khas dan kuliner kota Balikpapan
2	13.30 – 14.40	Balikpapan - Jakarta	Flight menuju Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP. 106/1/9/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Kebutuhan Informasi dan Pengembangan
Teknologi Informasi untuk Monev
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

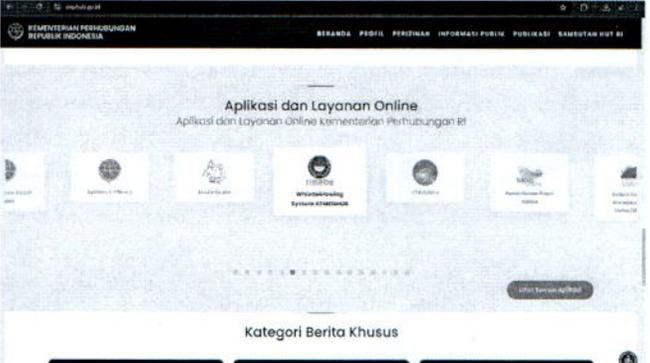
Jakarta, 13 September 2024

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dengan hormat bersama ini disampaikan, menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 774/KIP/IX/2024 perihal Tahapan Monev KIP Tahun 2024, saat ini sedang berlangsung Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di seluruh badan publik termasuk Kementerian Perhubungan.

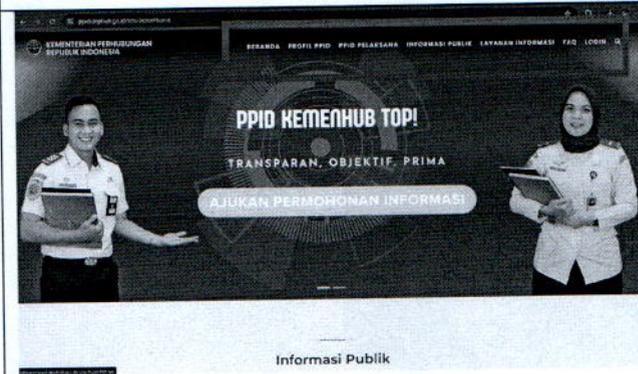
Tujuan pelaksanaan monev tersebut adalah untuk pemeringkatan dan menilai kepatuhan badan publik termasuk Kementerian Perhubungan dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai informasi, sejak tahun 2019, Kementerian Perhubungan dapat terus mempertahankan predikat "Informatif" yaitu peringkat tertinggi dari penilaian keterbukaan informasi publik.

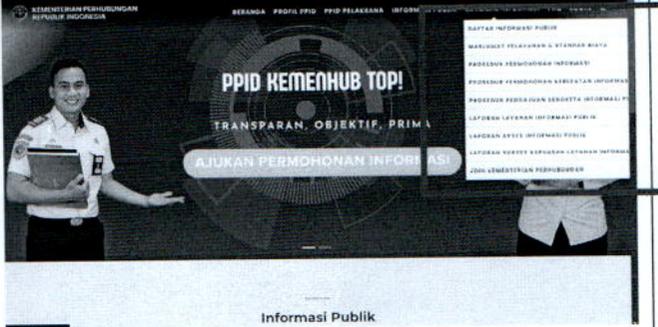
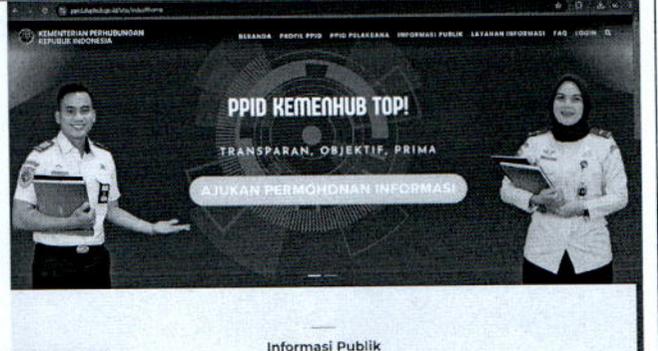
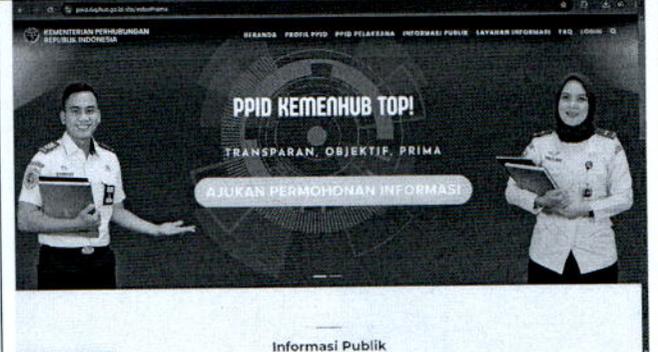
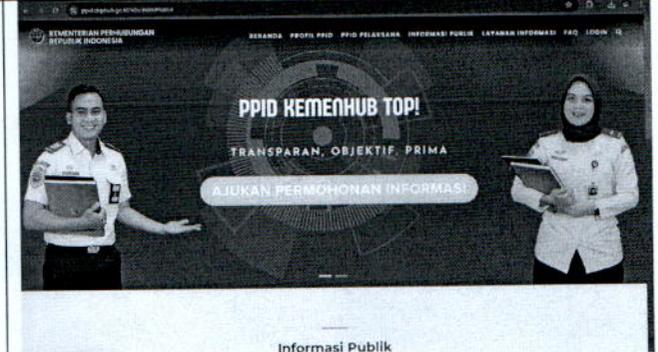
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan dukungan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi serta mendukung pengembangan dalam sisi teknologi yang dibutuhkan sebagaimana berikut:

NO.	DATA DAN INFORMASI	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga/Badan Publik Menyediakan Aplikasi-Aplikasi yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Menyediakan Data aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada portal dephub.go.id  Konfirmasi kembali aplikasi dan layanan online yang berkaitan dengan SPBE

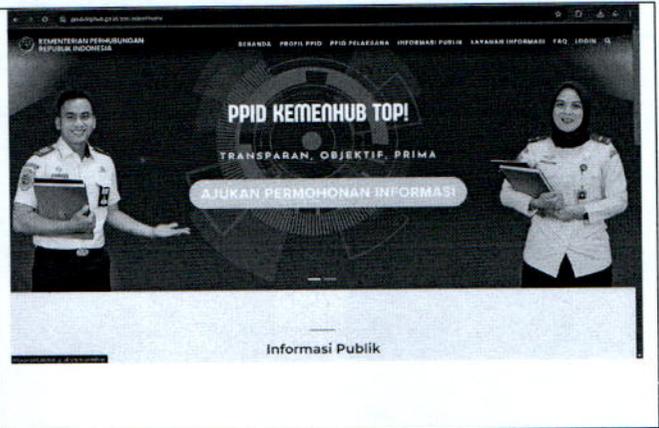
2.	Pengumuman informasi khusus pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat	Pemutakhiran informasi terkait menu perizinan yang terdapat dalam portal dephub.go.id Tautan : https://dephub.go.id/perizinan
3.	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi /PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum	Pembuatan mobile aplikasi PPID berbasis android dan iOS

NO.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	KETERANGAN
1.	Menambahkan Sub Menu RUANG LINGKUP / KEWENANGAN pada menu PROFIL di portal dephub.go.id	
2.	Menambahkan Sub Menu TUGAS DAN FUNGSI SERTA KANTOR UNIT-UNIT DIBAWAHNYA pada menu PROFIL di portal dephub.go.id	
3.	Menambahkan Sub Menu STRUKTUR ORGANISASI pada menu PROFIL di portal dephub.go.id	

<p>4.</p>	<p>Menambahkan Sub Menu PROFIL PEJABAT pada menu PROFIL di portal dephub.go.id</p> <p>Profil Pejabat ditambahkan dengan kolom isian yang dapat menampilkan LHKPN dari masing masing pejabat</p>	
<p>5.</p>	<p>Menambahkan Menu REGULASI yang ditautkan kepada portal JDIH Kemenhub di portal dephub.go.id</p>	
<p>6.</p>	<p>Menghapus Menu SAMBUTAN HUT RI di portal dephub.go.id</p>	
<p>7.</p>	<p>Menambahkan Menu PROSEDUR di portal ppid.dephub.go.id</p> <p>Berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Keberatan; 3. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik; 4. SOP Pengujian Konsekuensi; dan 5. SOP Pendokumentasian informasi publik. 	

<p>8.</p>	<p>Menghilangkan Sub Menu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Permohonan Informasi; 2. Prosedur Permohonan Keberatan Informasi; dan 3. Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Publik. <p>Pada Menu LAYANAN INFORMASI di portal ppid.dephub.go.id.</p>	
<p>9.</p>	<p>Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik / lainnya di portal ppid.dephub.go.id</p> <p>Penambahan kanal unggahan video di beranda</p>	
<p>10.</p>	<p>Menyediakan penambahan kanal ARTIKEL KEGIATAN pada beranda portal ppid.dephub.go.id</p>	
<p>11.</p>	<p>Menyediakan penambahan kanal DOKUMENTASI KEGIATAN pada beranda portal ppid.dephub.go.id</p>	

12. Menyediakan penambahan kanal **APLIKASI TERKAIT** pada beranda portal ppid.dephub.go.id



Diharapkan data-data dan pemutakhiran dimaksud dapat disesuaikan selambat-lambatnya Jumat, 20 September 2024. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Christanto [REDACTED]

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,



Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 774 /KIP/IX/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tahapan Monev KIP Tahun 2024

Jakarta, 2 September 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Publik
C.q. PPID Badan Publik
(daftar terlampir)
di tempat

Dengan hormat,

Komisi Informasi Pusat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Registrasi dan Tahapan Pengisian Kuesioner Evaluasi Diri**
Pelaksanaan : Tanggal 4 September s.d 5 Oktober 2024
Pengisian : <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>
- 2. Penilaian Kuesioner (Verifikasi)**
Pelaksanaan : 7 – 25 Oktober 2024
- 3. Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ**
Pelaksanaan : 26 – 2 November 2024
- 4. Verifikasi Klarifikasi**
Pelaksanaan : 4 – 9 November 2024
- 5. Tahapan Presentasi/Uji Publik**
Pelaksanaan : 12 – 14 November 2024
- 6. Tahapan Visitasi**
Pelaksanaan : 18 – 30 November 2024
- 7. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024**
Pelaksanaan : Desember 2024 (akan diberitahukan kemudian)

Berikut kami lampirkan Pedoman Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Self-Assessment Questioner (SAQ) Tahun 2024. Untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Pimpinan Badan Publik, bahwa tahapan pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diisi sudah mendapatkan persetujuan Bapak/Ibu Pimpinan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Komisi Informasi Pusat Sdri. Aditya Nuriya S. (██████████) atau Sdr. Reno (██████████).


KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

DONNY YOESGIANTORO

Narahubung Badan Publik

- | | |
|----------------|---|
| 1. Kementerian | : Binarlyn Indri Rahayu (██████████) |
| 2. LN & LPNK | : Istiningsih (██████████) |
| 3. LNS | : Firmi Mustika (██████████) |
| 4. Pemprov | : Istiningsih (██████████) |
| 5. BUMN | : Leni Sulistiani (██████████) |
| 6. PTN | : Siti Ajjah (██████████) / Reno (██████████) |
| 7. Parpol | : Karel Martel (██████████) |

Lampiran Surat I

Nomor : 774 /KIP/IX/2024

Tanggal : 2 September 2024

DAFTAR BADAN PUBLIK KEMENTERIAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP.103/216/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara Majalah
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 8 Agustus 2024

Yth. Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Indonesia. Majalah ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara untuk *e-magazine* Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Rabu, 14 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tya (WA: [REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat

Nomor : 17.103/2/6/STJ/2024

Tanggal : 8 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : TRANSFORMASI TRANSPORTASI MENUJU IBU KOTA NEGARA BARU SUB TEMA: RENCANA KAJIAN IBU KOTA NEGARA

1. Mohon dijelaskan secara detail terkait apa saja rekomendasi kebijakan transportasi penyangga IKN oleh Baketrans?
2. Dari kajian tersebut, apa saja kajian yang kemungkinan bisa diterapkan di IKN?
3. Apa saja tantangan dalam mewujudkan sistem transportasi cerdas dan terintegrasi di IKN?
4. Apakah ada evaluasi atau forum diskusi yang akan diselenggarakan kembali oleh Baketrans terkait transportasi IKN dalam waktu dekat?
5. Apa yang menjadi harapan?
6. Mohon informasi tambahan data terkait tema

Terima kasih



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP. 103 / 2 / 11 / STJ / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Liputan dan Wawancara
E-Magazine Transmedia Kementerian Perhubungan

Jakarta, 20 Agustus 2024

Yth. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur

Kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia yang dimaksudkan sebagai sarana informasi lengkap dan mendalam terkait kebijakan serta isu strategis di dunia transportasi. *E-Magazine* Transmedia ini ditujukan kepada para *stakeholder* transportasi antara lain pemerintah daerah, BUMN, operator, pengamat transportasi, akademisi, dan masyarakat pengguna transportasi.

Pada edisi pertama tahun 2024, Tim Redaksi *e-magazine* Transmedia akan melaksanakan peliputan pada 21-23 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengulas transportasi pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk layanan Antarmoda Balikpapan – IKN, dengan personil sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Arifatmi Hastuti NIP: 198410182009122002	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi
2.	Aditya Dwi Ardiandhini NIP: 19861219 202012 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Humas Ahli Pertama
3.	Rohani	-	Penulis Transmedia
4.	Septian Fajar Saputra	-	Fotografer Transmedia
5.	Jovita Alesandra Nathania	-	Pengelola Media Sosial Transmedia

Berkenaan dengan itu, guna kelancaran tugas dimaksud dimohon kiranya dapat membantu pelaksanaan kegiatan peliputan dan wawancara di wilayah kerja Saudara. Kami lampirkan pula *rundown* kegiatan dan daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat diakses melalui tautan <https://transmediakemenhub.id>. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdr. Tya (██████████).

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Seditjen Perhubungan Darat.

Lampiran Surat Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Nomor : IP.103 / 2 / 11 / STJ / 2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

1. Mohon dapat dijelaskan secara detail apa saja kewenangan BPTD Kelas II Kalimantan Timur, khususnya terkait penyelenggaraan angkutan dari dan menuju IKN Nusantara?
2. Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, mohon dapat dijelaskan secara detail terkait:
 - a. Dukungan BPTD
 - b. Kendala/tantangan
 - c. Apakah sudah ada hasil evaluasi kegiatan
3. Salah satu transportasi yang sudah diuji coba menuju IKN Nusantara adalah Electronic Bus (E-Bus). Bagaimana dukungan BPTD dalam menghadirkan layanan kendaraan listrik tersebut? Mohon dapat dijelaskan berikut langkah/upaya antisipasi dan mitigasi dari setiap kendala/tantangan yang ada.
4. Terminal Samarinda Seberang diusulan membuka trayek rute Samarinda – IKN. Seperti apa kelanjutan dari usulan tersebut?
5. Mohon dapat dijelaskan layanan antarmoda Balikpapan berbasis bus yang mendukung proyek Pembangunan IKN, seperti
 - a. Rute/lintasan
 - b. Jadwal
 - c. Tarif
 - d. Keterisian penumpang
6. Apa yang menjadi harapan untuk transportasi pendukung IKN?
7. Mohon tambahan data pendukung terkait tema

Terima kasih

**Rundown Liputan Majalah Transmedia Balikpapan
21-23 Agustus 2024**

No	Waktu	Lokasi	Kegiatan
Rabu, 21 Agustus 2024			
1	06.20 – 09.30	Jakarta - Balikpapan	Flight pagi menuju Balikpapan
2	10.00 – 11.00	Bandara Sepinggan	Liputan dan wawancara dengan EGM AP I
3	11.00 – 12.00	Kantor Otoritas Bandara	Wawancara dengan Kaotban
3	12.00 – 13.00		break ISHOMA
4	13.15 – 14.00	Kantor KSOP Balikpapan	Wawancara dengan Kepala KSOP
5	14.00 - selesai	Dermaga Sandy Jaya	Liputan kapal Pinisi di Dermaga Sandy Jaya
Kamis, 22 Agustus 2024			
1	08.00 – 10.00	Kantor BPTD Balikpapan	Wawancara Kepala BPTD
2	10.00 – 12.00		Perjalanan dari Terminal Batu Ampar Balikpapan – IKN dengan Bus Antarmoda
3	12.00 – 13.00	IKN	break ISHOMA
4	13.00 – 17.00	IKN	Liputan IKN
5	17.30 – 19.30		Perjalanan IKN- Balikpapan
Jumat, 23 Agustus 2024			
1	08.00-12.00	Kota Balikpapan	Liputan khas dan kuliner kota Balikpapan
2	13.30 – 14.40	Balikpapan - Jakarta	Flight menuju Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : LP.103/2/2/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara Majalah
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 8 Agustus 2024

Yth. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Indonesia. Majalah ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara untuk *e-magazine* Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Kamis, 15 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tya (WA [REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat

Nomor : IP. 103 / 2 / 2 / STJ / 2024

Tanggal : 8 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA: REAKTIVASI STASIUN PONDOK RAJEG

1. Terkait dengan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg.
 - a. Mohon dapat dijelaskan dengan detil, hal apa saja yang melatarbelakangi reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg?
 - b. Bagaimana prosesnya?
 - c. Bagaimana kesiapannya saat ini?
 - d. Apa yang menjadi kendala dan tantangan?
2. Bagaimana koordinasi yang dilakukan BPTJ bersama DJKA, BTP, KAI (KCI) terkait dengan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg?
3. Dalam proses pembangunannya, adakah program padat karya yang dilaksanakan?
4. Untuk dapat mempermudah mobilitas masyarakat, bagaimana konektivitas antar moda nantinya?
5. Peran dan harapan ke depannya terkait dengan pengoperasian kembali Stasiun Pondok Rajeg? Hal lain yang ingin disampaikan?

Terima kasih



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : **IP.103/2/12/STJ/2024**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Liputan dan Wawancara
E-Magazine Transmedia Kementerian Perhubungan

Jakarta, 20 Agustus 2024

Yth. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan

Kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia yang dimaksudkan sebagai sarana informasi lengkap dan mendalam terkait kebijakan serta isu strategis di dunia transportasi. *E-Magazine* Transmedia ini ditujukan kepada para *stakeholder* transportasi antara lain pemerintah daerah, BUMN, operator, pengamat transportasi, akademisi, dan masyarakat pengguna transportasi.

Pada edisi pertama tahun 2024, Tim Redaksi *e-magazine* Transmedia akan melaksanakan peliputan pada 21-23 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengulas transportasi pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk keberadaan Pelabuhan Semayang yang cukup krusial dan layanan Kapal Pinisi pendukung wisata IKN, dengan personil sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Arifatmi Hastuti NIP: 198410182009122002	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi
2.	Aditya Dwi Ardiandhini NIP: 19861219 202012 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Humas Ahli Pertama
3.	Rohani	-	Penulis Transmedia
4.	Septian Fajar Saputra	-	Fotografer Transmedia
5.	Jovita Alesandra Nathania	-	Pengelola Media Sosial Transmedia

Berkenaan dengan itu, guna kelancaran tugas dimaksud dimohon kiranya dapat membantu pelaksanaan kegiatan peliputan dan wawancara di wilayah kerja Saudara. Kami lampirkan pula *rundown* kegiatan dan daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat diakses melalui tautan <https://transmediakemenhub.id>. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdr. Tya (██████████).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sesditjen Perhubungan Laut.

Lampiran Surat Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Nomor : IP. 103 / 2 / 12 / STJ / 2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

1. Mohon dapat dijelaskan, apa saja yang menjadi tugas dan peran KSOP I Balikpapan dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan angkutan laut di perairan Kaltim? Mohon dapat dijelaskan pula wilayah kerja KSOP I Balikpapan
2. Apa saja pengembangan/pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan KSOP I Balikpapan, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun infrastruktur? Adakah inovasi yang dikembangkan KSOP I Balikpapan untuk meningkatkan keselamatan maupun kemudahan bagi penyelenggara maupun pengguna transportasi laut di perairan Kaltim?
3. Bagaimana upaya dan kebijakan KSOP I Balikpapan dalam mendukung aksesibilitas dan konektivitas IKN? Khususnya, persiapan menjelang peringatan HUT RI, saat hari-H, dan pascaperingatan HUT RI.
4. Pembangunan IKN masih terus berlangsung, apa saja dampak pembangunan tersebut terhadap pelayaran di perairan Kaltim? Adakah kebijakan, langkah/strategi khusus yang dilakukan KSOP I Balikpapan sebagai upayaantisipasi?
5. Mohon dapat dijelaskan terkait uji sandar maupun kelaikan Kapal Phinisi Panrita Sipuliang yang telah dilakukan KSOP I Balikpapan pada 31 Juli dan 1 Agustus lalu. Bagaimana prosesnya dan apa yang masih menjadi kendala? Bagaimana peran, urgensi, dan potensi kapal phinisi sebagai sarana transportasi pendukung IKN? Apa peran KSOP I Balikpapan berkenaan dengan beroperasinya Kapal Phinisi tersebut? (sumber: <https://www.instagram.com/p/C-HoNLVRZcW/>, <https://www.instagram.com/p/C-KOeAHxvzv/>, <https://www.instagram.com/p/C-IYbhFylQy/>)
6. Bagaimana pula peran dan kewenangan KSOP I Balikpapan berkenaan dengan Autonomous Rail Transit (ART) yang telah tiba di Terminal Peti Kemas PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) pada 30 Juli 2024 lalu? (sumber: <https://www.instagram.com/p/C-DRuofR7px/>)
7. Apa saja yang menjadi tantangan dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran angkutan laut di Kaltim? Khususnya, setelah adanya IKN di wilayah Kaltim? Bagaimana strategi untuk mengantisipasi dan mitigasinya?
8. Bagaimana sinergi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan angkutan laut dan kepelabuhanan di wilayah Kaltim?

Terima kasih

**Rundown Liputan Majalah Transmedia Balikpapan
21-23 Agustus 2024**

No	Waktu	Lokasi	Kegiatan
Rabu, 21 Agustus 2024			
1	06.20 – 09.30	Jakarta - Balikpapan	Flight pagi menuju Balikpapan
2	10.00 – 11.00	Bandara Sepinggan	Liputan dan wawancara dengan EGM AP I
3	11.00 – 12.00	Kantor Otoritas Bandara	Wawancara dengan Kaotban
3	12.00 – 13.00		break ISHOMA
4	13.15 – 14.00	Kantor KSOP Balikpapan	Wawancara dengan Kepala KSOP
5	14.00 - selesai	Dermaga Sandy Jaya	Liputan kapal Pinisi di Dermaga Sandy Jaya
Kamis, 22 Agustus 2024			
1	08.00 – 10.00	Kantor BPTD Balikpapan	Wawancara Kepala BPTD
2	10.00 – 12.00		Perjalanan dari Terminal Batu Ampar Balikpapan – IKN dengan Bus Antarmoda
3	12.00 – 13.00	IKN	break ISHOMA
4	13.00 – 17.00	IKN	Liputan IKN
5	17.30 – 19.30		Perjalanan IKN- Balikpapan
Jumat, 23 Agustus 2024			
1	08.00-12.00	Kota Balikpapan	Liputan khas dan kuliner kota Balikpapan
2	13.30 – 14.40	Balikpapan - Jakarta	Flight menuju Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62.813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.207/34/10/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Finalis
Lomba Band Harhubnas 2024

Jakarta, 26 Agustus 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terkait penyiapan Lomba Band Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama Biro Keuangan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tahap akhir pemilihan finalis Lomba Band Harhubnas 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan diselenggarakan secara *offline* atau luring pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat BKIP, Gedung Karya Lantai 7
Acara : Rapat Koordinasi Finalis Lomba Band Harhubnas 2024
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,



Ditandatangani secara elektronik
BUDI RAHARDJO, S.SOS, M.SI
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : UM.207/34/10/STJ/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

1. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
2. Kepala Biro Keuangan; dan
3. Para Kepala Bagian dan Koordinator di Lingkungan BKIP.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

TTD

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : **IP. 103 / 2 / 8 / STJ / 2024**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara *E-Magazine*
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 20 Agustus 2024

Yth. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi. Indonesia. *E-Magazine* ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara secara luring atau daring, untuk *e-magazine* Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Selasa, 20 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tya (WA XXXXXXXXXX).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik.

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Nomor : 1P.103 / 2 / 8 / STJ / 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : TRANSFORMASI TRANSPORTASI MENUJU IBU KOTA NEGARA BARU

1. Otorita IKN memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, mohon dijelaskan secara detail terkait:
 - a. Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, apakah sesuai dengan *blueprint/target* pembangunan?
 - b. Hingga saat ini, apa saja badan usaha/sector yang nantinya dipastikan akan hadir di IKN?
2. Selain faktor cuaca, apa saja kendala dan tantangan yang muncul selama pembangunan? Apakah ada kendala khusus yang dihadapi dan bagaimana solusinya?
3. Otorita IKN berkomitmen dalam pembangunan kota hutan, hal tersebut dibuktikan melalui gelaran konferensi internasional pembangunan kota hutan dan pemulihan keanekaragaman hayati dan budaya. Bagaimana respon 12 negara yang berpartisipasi terkait rancangan desain pembangunan IKN?
4. Seperti apa kolaborasi Otorita IKN bersama *stakeholder* dalam memastikan pembangunan IKN berjalan tepat sesuai target?
5. Bagaimana Otorita IKN membangun kepercayaan masyarakat utamanya investor untuk berinvestasi di IKN?
6. Apa yang menjadi harapan?
7. Mohon tambahan data pendukung terkait tema

Terima kasih



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE : AKHIR

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERIODE PENILAIAN :
01 JANUARI SD 31 DESEMBER 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: MELLA LOLIARI CHINTINA, S.Sos
	NIP	: 199401252020122002
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Penata Muda / III/a
	JABATAN	: Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
	UNIT KERJA	: Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: TINITAH SRI AMRANTASI, S.Sos., M.Si.
	NIP	: 198004112006042001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina / IV/a
	JABATAN	: Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
	UNIT KERJA	: Biro Komunikasi dan Informasi Publik
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: BUDI RAHARDJO, S.Sos., M.Si.
	NIP	: 197011061997031001
	PANGKAT/GOL. RUANG	: Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	: Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
	UNIT KERJA	: Biro Komunikasi dan Informasi Publik
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN REKOMENDASI	

Jakarta, 18 Januari 2024
Pegawai yang Dinilai

MELLA LOLIARI CHINTINA, S.Sos
199401252020122002

Jakarta, 18 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

TINITAH SRI AMRANTASI, S.Sos., M.Si.
198004112006042001

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2023 SD 31 Desember 2023		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KERJA	
1	NAMA	MELLA LOLIARI CHINTINA, S.Sos	1	NAMA	TINITAH SRI AMRANTASI, S.Sos., M.Si.
2	NIP	19940125 202012 2 002	2	NIP	19800411 200604 2 001
3	PANGKAT / GOL RUANG	Penata Muda (III/a)	3	PANGKAT / GOL RUANG	Pembina (IV/a)
4	JABATAN	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	4	JABATAN	Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
5	UNIT KERJA	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	5	UNIT KERJA	Biro Komunikasi dan Informasi Publik

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik. INDIKATOR : Laporan pengelolaan opini publik.	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, dan analisis dari media massa.	KUANTITAS	Laporan Daily Briefing	200 (dokumen)
2	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik. INDIKATOR : Laporan monitoring pemberitaan media massa dan media sosial.	Terlaksananya monitoring media massa, media cetak, media sosial, dan media tv.	KUANTITAS	Laporan Media Monitoring Media Massa dan Media Sosial	200 (dokumen)
3	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik. INDIKATOR : Laporan SPIP Biro Komunikasi dan Informasi Publik.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan BKIP	KUANTITAS	Laporan Tahunan SPIP	1 (dokumen)
4	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik. INDIKATOR : Laporan Tahunan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.	Terlaksananya rekapitulasi Data Statistik Tahunan di Lingkungan BKIP	KUANTITAS	Laporan Data Statistik Tahunan	1 (dokumen)
5	Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik. INDIKATOR : Laporan analisis bahan rapat koordinasi kegiatan komunikasi publik Kementerian Perhubungan.	Terlaksananya penyusunan bahan rapat koordinasi komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan	KUANTITAS	Bahan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik	20 (dokumen)

TAMBAHAN

1	<p>Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik.</p> <p>INDIKATOR : Laporan Tahunan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.</p>	<p>Terlaksananya sistem persuratan yang teratur</p>	<p>KUANTITAS</p>	<p>Disposisi ke semua bagian</p>	<p>200 (dokumen)</p>
2	<p>Terlaksananya penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Internai Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik.</p> <p>INDIKATOR : Laporan monitoring pemberitaan media massa dan media sosial.</p>	<p>Terlaksananya kesehatan jasmani</p>	<p>WAKTU</p>	<p>Sehat jasmani</p>	<p>100 (jam)</p>

PRILAKU KERJA		
1	Berorientasi Pelayanan	
	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka menolong orang lain Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai



MELLA LOLIARI CHINTINA, S.Sos
19940125 202012 2 002

Jakarta, 02 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja



TINITAH SRI AMRANTASI, S.Sos., M.Si.
19800411 200604 2 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2023 SD 31 Desember 2023
DUKUNGAN SUMBER DAYA		
1	Peralatan kantor yang menunjang (PC, Koneksi Internet, Ruang Kerja yang Nyaman), dan Dukungan rekan kerja yang kompeten	
KONSEKUENSI		
1	apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka penilaiannya di atas ekspektasi	
2	apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka penilaiannya di bawah ekspektasi	
SKEMA PERTANGGUNG JAWABAN		
1	hasil kerja dilaporkan setiap bulannya berikut dengan data yang akan dilaporkan	

Pegawai Yang Dinilai



MELLA LOLIARI CHINTINA, S.Sos
19940125 202012 2 002

Jakarta, 02 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja



TINITAH SRI AMR ANTASI, S.Sos., M.Si.
19800411 200604 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP.: (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-11111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK. 401 / 1 / 4 / SJ / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan
SP4N Lapor

Jakarta, 11 September 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 dan dalam rangka menjalankan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) di Bidang Perhubungan, Kementerian Perhubungan telah menerima pengaduan masyarakat melalui website **Lapor.go.id**.

SP4N Lapor merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik. Dalam menindaklanjuti aduan atau laporan, setiap admin SP4N Lapor perlu mematuhi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 hari, 14 hari, dan 60 hari kerja setelah masuknya pengaduan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan pengaduan yang belum ditindaklanjuti per tanggal 9 September 2024 serta laporan evaluasi pemanfaatan SP4N Lapor triwulan 1 dan triwulan 2. (terlampir)

NO.	UNIT KERJA	PENGADUAN BELUM DITINDAKLANJUTI
1.	Inspektorat Jenderal	0 pengaduan
2.	Ditjen Perhubungan Darat	13 pengaduan
3.	Ditjen Perhubungan Laut	2 pengaduan
4.	Ditjen Perhubungan Udara	2 pengaduan
5.	Ditjen Perkeretaapian	12 pengaduan
6.	BPSDMP	4 pengaduan
7.	Badan Kebijakan Transportasi	0 pengaduan
8.	BPTJ	8 pengaduan
Total		41 pengaduan

Menindaklanjuti pengaduan dimaksud, dimohon bantuannya dari masing-masing unit kerja agar dapat menindaklanjuti dengan memberikan jawaban pengaduan yang substantif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan
Informasi,



Mia Ermaya
NIP. 19701106 199703 1 001

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat

Nomor : Hk.401/1/4/STJ/2024

Tanggal : 11 September 2024

1. Inspektorat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Badan Kebijakan Transportasi; dan
8. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.



a.n. Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan
Informasi,

Mia Ermaya
NIP. 19701106 199703 1 001

Evaluasi Pengelolaan LAPOR
Pengaduan Belum Ditindaklanjuti s/d 9 September 2024

No.	Sub Sektor	Tracking ID	Tanggal Disposisi	Perihal
1	Ditjen Perhubungan Darat	7977466	23 Juli 2024	Tiket bus
		7921264	29 Juli 2024	Masukan pemasangan garis kejut
		8009350	2 Agustus 2024	Lampu PJU mati
		8024893	2 Agustus 2024	Revitalisasi terminal
		8025982	2 Agustus 2024	Revitalisasi terminal
		7922992	5 Agustus 2024	Masukan pemberian marka zebra cross
		8083177	14 Agustus 2024	Tarif transportasi
		8046043	15 Agustus 2024	Masukan penertiban transportasi
		8066695	15 Agustus 2024	Masukan pelayanan publik
		8071762	15 Agustus 2024	Tarif transportasi
		8065171	15 Agustus 2024	Lampu PJU mati
		8059036	15 Agustus 2024	Lampu PJU mati
		8132395	9 September 2024	Masukan peraturan tentang tarif transportasi online
2	Ditjen Perhubungan Laut	8065159	15 Agustus 2024	Efisiensi anggaran
		8071774	15 Agustus 2024	Sarana prasarana
3	Ditjen Perhubungan Udara	8007409	15 Agustus 2024	Masukan pemasangan lampu pada tower telekomunikasi
		8100169	23 Agustus 2024	Aspirasi rute penerbangan
	Ditjen Perkeretaapian	6405562	20 Juni 2024	Biaya prasarana kereta api
		7350199	10 Juli 2024	Masukan jalur KRL Medan
		7033576	29 Juli 2024	Revitalisasi perlintasan sebidang
		7153807	29 Juli 2024	Masukan pembangunan stasiun
		7271863	29 Juli 2024	Pekerjaan lahan
		7998310	29 Juli 2024	Sarana kereta api
		7350136	29 Juli 2024	Masukan jalur layang
		7350301	29 Juli 2024	Masukan jalur layang
		8019811	2 Agustus 2024	Masukan akses kereta
		6821962	5 Agustus 2024	Masukan kereta bandara Kediri
		8122381	29 Agustus 2024	Usulan penambahan rute
5	BPSDMP	7560094	22 Maret 2024	Perundangan
		7698229	2 Mei 2024	Perundangan
		7853692	20 Juni 2024	Pengaduan etika pegawai
		8032279	15 Agustus 2024	Sertifikat
6	BPTJ	7752037	14 Mei 2024	Aspirasi perbaikan layanan transportasi
		7847680	19 Juni 2024	Layanan kurang memadai
		7848052	19 Juni 2024	Lampu PJU mati
		7860103	23 Juli 2024	Kemacetan
		7900366	29 Juli 2024	Kerusakan jalan
		8005972	15 Agustus 2024	Lampu PJU mati
		8005777	15 Agustus 2024	Lampu PJU mati
		7976911	26 Agustus 2024	Lampu PJU mati



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-11111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : KP. 504 / 2 / 2 / STJ / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Menghadiri *Live Performance*
Lomba Band Harhubnas 2024

Jakarta, 3 September 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan telah dilaksanakannya seleksi kegiatan Lomba Band dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama dengan Biro Keuangan dan BPTJ akan menyelenggarakan acara *Live Performance* untuk menilai secara langsung 10 (sepuluh) Finalis Lomba Band Harhubnas Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk turut memeriahkan acara dimaksud dan mendukung finalis perwakilan dari masing-masing unit kerja (daftar finalis terlampir), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 September 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai (Susunan acara terlampir)
Tempat : Lobby Gedung Cipta Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat Undangan

Nomor : KP. 504 / 2 / 2 / STJ / 2024

Tanggal : 3 September 2024

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
9. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
10. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
11. Kepala Biro Keuangan;
12. Kepala Biro Umum;
13. Kepala Biro Perencanaan;
14. Kepala Biro SDM dan Organisasi;
15. Kepala Biro Hukum;
16. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
17. Kepala Pusat Data dan Informasi;
18. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
19. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
20. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
21. Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan;
22. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat;
23. Kepala KSOP Kelas I Panjang;
24. Kepala KSOP Kelas I Palembang;
25. Kepala UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu;
26. Kepala UPBU Tanjung Harapan;
27. Kepala BTP Kelas I Surabaya; dan
28. Para Kepala Bagian dan Koordinator di Lingkungan BKIP.

Rundown Acara...

**RUNDOWN ACARA
LIVE PERFORMANCE FINALIS LOMBA BAND
HARI PERHUBUNGAN NASIONAL 2024**

Rabu, 4 September 2024

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan	MC
09.05 – 09.20 WIB	Laporan panitia	Kabag PPI BKIP
09.20 – 09.30 WIB	Sambutan Kepala BKIP	Kepala BKIP
09.30 – 12.00 WIB	<i>Live Performance</i> 5 Finalis	Panitia
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia
13.00 – 15.00 WIB	<i>Live Performance</i> 5 Finalis	Panitia
15.00 – 15.15 WIB	Pengumuman Juara Lomba Band	Panitia
15.15 – 15.30 WIB	Penyerahan Hadiah	Sekretaris Jenderal

**10 FINALIS LOMBA BAND
HARI PERHUBUNGAN NASIONAL TAHUN 2024**

1. Biro Umum - B-VI (B-six);
2. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan - Bipitidi Banua
3. BPTD Kelas II Sumatra Barat;
4. KSOP Kelas I Panjang – Harbourwave;
5. KSOP Kelas I Palembang - Ampera Bridge;
6. UPBU Mutiara SIS Al-Jufri Palu - Jet Blast;
7. UPBU Kelas III Tanjung Harapan - Tanjung Harapan Band;
8. BTP Kelas I Surabaya;
9. Badan Kebijakan Transportasi – BC Band; dan
10. BPTJ - Symphoni Of Integration.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : 18.103/2/S/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara *E-Magazine*
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 8 Agustus 2024

Yth. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Indonesia. Majalah ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara, untuk majalah Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Senin, 12 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Ari (WA: [REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sesditjen Perhubungan Laut.

“Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

Lampiran Surat

Nomor : IP.103 / 2 / 5 / STJ / 2024

Tanggal : 8 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : MENIKMATI WISATA BALIKPAPAN DENGAN KAPAL PINISI

1. Terkait dengan pengoperasian dua unit Kapal Pinisi di Balikpapan untuk dapat menunjang pariwisata IKN, Mohon dapat dijelaskan dengan detail, bagaimana kesiapan yang telah dilakukan?
2. Mohon dapat disampaikan terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan. Terkait,
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Sertifikasi SDM
 - c. Badan pengelola Kapal Pinisi
 - d. Keselamatan dan keamanannya
3. Apa yang menjadi tantangan dalam menghadirkan Kapal Pinisi sebagai moda transportasi sekaligus mendukung pariwisata di IKN? Mohon dapat dijelaskan berikut langkah/upaya antisipasi dan mitigasi dari setiap kendala/tantangan yang ada?
4. Bagaimana koordinasi Ditlala dengan setiap stakeholders terkait? DPOP Balikpapan, KSOP Kelas I Balikpapan, OIKN, dan pihak terkait lainnya?
5. Bagaimana jalur yang dilalui kapal Pinisi ini nantinya? Wisata apa saja yang akan disinggahi?
6. Bagaimana fasilitas yang disediakan di Kapal Pinisi ini?
7. Bagaimana pengembangan yang akan dilakukan ke depannya?
8. Hal lain yang ingin disampaikan? Bagaimana pesan dan harapan?

Terima kasih



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP.103/2/3/570/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara Majalah
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 8 Agustus 2024

Yth. Direktur Bandar Udara

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi. Indonesia. Majalah ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara untuk *e-magazine* Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Rabu, 14 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Tya (WA: [REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sesditjen Perhubungan Udara.

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat

Nomor : P.103/2/3/STJ/2024

Tanggal : 8 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : TRANSFORMASI TRANSPORTASI MENUJU IBU KOTA NEGARA BARU SUB TEMA: BANDAR UDARA VVIP DI IBU KOTA NEGARA

1. Bandara VVIP IKN ditergetkan akan bisa beroperasi akhir Agustus ini.
 - a. Sejauh mana progress pembangunannya saat ini?
 - b. Bagaimana kesiapan Bandara VVIP IKN dalam mendukung konektivitas di IKN? Bagaimana integrasi dengan moda lain nantinya?
 - c. Selain diperuntukan khusus bagi penumpang VVIP yang akan datang dan pergi, hal apa saja yang akan membedakan Bandara VVIP IKN dengan bandara lainnya di Indonesia?
 - d. Apa saja yang menjadi tantangan dan kendala dalam proses pembangunan Bandara VVIP IKN?
2. Bagaimana sinergi/kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari lintas kementerian/lembaga, pengelola bandara, pihak maskapai, pemda, dan pihak terkait lainnya?
3. Dalam menyandang status bandara VVIP, bagaimana upaya dan kesiapan yang akan dilakukan untuk menjamin kelancaran penerbangan, keselamatan, dan keamanan penerbangan di wilayah IKN atau di Kalimantan?
4. Ada wacana pemerintah akan mencabut status VVIP Bandara IKN.
 - a. Mohon dapat dijelaskan terkait dengan wacana tersebut.
 - b. Bandara VVIP IKN tentu didesain berbeda dengan bandara umum lainnya. Jika wacana tersebut direalisasikan, apakah nantinya akan ada perubahan konsep design, sarana dan prasarana? Penambahan kapasitas?
5. Hal lain yang ingin disampaikan mengenai penyelenggaraan transportasi udara dalam mendukung pembangunan IKN?

Terima kasih



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : 18.103/2/4/STJ/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Wawancara *E-Magazine*
Transmedia Tahun 2024

Jakarta, 8 Agustus 2024

Yth. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Kami sampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia sebagai media informasi lengkap dan mendalam mengenai kehadiran sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah, manfaat pengembangan transportasi bagi pembangunan ekonomi wilayah dan masyarakat, dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan transportasi. Indonesia. Majalah ini ditujukan untuk kalangan pembentuk opini publik (akademisi, aktivis LSM, dsb), kelompok legislatif, pemerintah daerah, kalangan investor, dan pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna transportasi. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat dibaca dan diunduh melalui www.transmediakemenhub.id.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan wawancara, untuk majalah Transmedia edisi kedua tahun 2024 pada Selasa, 13 Agustus 2024 atau menyesuaikan waktu Bapak. Kami lampirkan pula daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Ari (WA: [REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sesditjen Perkeretaapian.

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran Surat

Nomor : 18.103/2/4/STJ/2024

Tanggal : 8 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

TEMA : TRANSFORMASI TRANSPORTASI MENUJU IBU KOTA NEGARA BARU SUB TEMA : AUTONOMOUS RAIL TRANSIT

1. Mohon dapat dijelaskan, bagaimana progres pembangunan, uji coba, serta operasional trem otonom hingga saat ini, ditinjau dari berbagai aspek: kualitas dan kelaikan operasi sarana & prasarana; realisasi target; fungsionalitas dan kebermanfaatan; catatan improvement/perbaikan; dll?
2. Apa saja tantangan/kendala saat proses uji coba operasional Trem Otonom? Apa saja catatan improvement/pengembangan lebih lanjut yang masih harus dilakukan terhadap Trem Otonom? Mohon dapat dijelaskan?
3. Saat ini, sejumlah regulasi tentang trem otonom masih tengah disiapkan. Regulasi tersebut akan mencakup 5 aspek. Mohon dapat dijelaskan seperti apa ketetapan yang akan diterapkan untuk setiap aspek tersebut:
 - a. Sarana dan prasarana Trem Otonom
 - b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas Trem Otonom
 - c. Sertifikasi Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Pengelola Trem Otonom
 - e. Standar, tata cara pengujian, dan sertifikasi Trem Otonom.
4. Hingga saat ini, bagaimana animo masyarakat/pengguna Trem Otonom dan potensi Trem Otonom sebagai moda transportasi modern dan ramah lingkungan di IKN? Mohon dapat dijelaskan dan disertai data (target) produksi Trem Otonom?
5. Apa yang menjadi tantangan dalam menghadirkan Trem Otonom sebagai moda transportasi di IKN? Mohon dapat dijelaskan berikut langkah/upaya antisipasi dan mitigasi dari setiap kendala/tantangan yang ada.
6. Hadirnya Trem Otonom adalah wujud kolaborasi sinergis lintas kementerian/lembaga. Mohon dapat dijelaskan terkait peran dan kewenangan dari setiap pihak yang berperan?
7. Bagaimana pengembangan Trem Otonom ke depannya yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun panjang? Adakah rencana pengembangan trem otonom di daerah lain di wilayah Kaltim sehingga kehadiran trem otonom dapat merajut konektivitas seluruh Kaltim atau, bahkan pengembangan di wilayah provinsi lainnya?
8. Apa yang menjadi harapan?

Terima kasih



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006

FAX. : (021) 3522338

SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA

email : pusdatin@dephub.go.id

home page : www.dephub.go.id

Nomor : *IP. 103 / 2 / 9 / STJ / 2024*

Jakarta, *20* Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lembar

Hal : Permohonan Liputan dan Wawancara

E-Magazine Transmedia Kementerian Perhubungan

Yth. General Manager Angkasa Pura I (Persero)

Kantor Cabang Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán

Kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki program kerja penerbitan *e-magazine* Transmedia yang dimaksudkan sebagai sarana informasi lengkap dan mendalam terkait kebijakan serta isu strategis di dunia transportasi. *E-Magazine* Transmedia ini ditujukan kepada para *stakeholder* transportasi antara lain pemerintah daerah, BUMN, operator, pengamat transportasi, akademisi, dan masyarakat pengguna transportasi.

Pada edisi pertama tahun 2024, Tim Redaksi *e-magazine* Transmedia akan melaksanakan peliputan pada 21-23 Agustus 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengulas transportasi pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk keberadaan Bandar Udara Sepinggán sebagai salah satu pintu masuk strategis IKN, dengan personil sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Arifatmi Hastuti NIP: 198410182009122002	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi
2.	Aditya Dwi Ardiandhini NIP: 19861219 202012 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Humas Ahli Pertama
3.	Rohani	-	Penulis Transmedia
4.	Septian Fajar Saputra	-	Fotografer Transmedia
5.	Jovita Alesandra Nathania	-	Pengelola Media Sosial Transmedia

Berkenaan dengan itu, guna kelancaran tugas dimaksud dimohon kiranya dapat membantu pelaksanaan kegiatan peliputan dan wawancara di wilayah kerja Saudara. Kami lampirkan pula *rundown* kegiatan dan daftar pertanyaan wawancara pada surat ini. Adapun *e-magazine* Transmedia dapat diakses melalui tautan <https://transmediakemenhub.id>. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi sdr. Tya (██████████).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Budi Rahardjo
Budi Rahardjo
NIP. 19701106 199703 1 001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Lampiran Surat Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Nomor : IP.103/8/9/STJ/2024

Tanggal : 20 Agustus 2024

DAFTAR PERTANYAAN

1. Belum siapnya Bandara VVIP IKN membuat pemerintah mengalihkan para tamu IKN termasuk VVIP ke Bandara SAMS Sepinggan sementara waktu. Mohon dapat disampaikan dan dijelaskan dengan detail, terkait dengan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan yang telah dilakukan di Bandara SAMS Sepinggan dalam menyambut para tamu yang akan datang ke IKN.
2. Bandara SAMS Sepinggan akan menjadi salah satu gerbang masuk untuk menuju IKN. Terkait dengan penumpang, apakah sudah ada lonjakan penumpang? Bagaimana kesiapan Bandara SAMS dalam menampung lonjakan penumpang? Mohon dapat sertakan data (Jumlah) penumpang dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini.
3. Untuk menunjang transportasi melalui Bandara SAMS yang akan menuju IKN nantinya,
 - a. Mohon dapat disampaikan dan dijelaskan dengan detail, terkait dengan kesiapan Bandara SAMS Sepinggan dalam menyokong IKN ini?
 - b. Program prioritas apa saja yang sedang/akan dilaksanakan Bandara SAMS Sepinggan? Apa saja capaian dan target kinerja saat ini dan kedepannya?
 - c. Bagaimana konektivitas transportasi penghubung Bandara SAMS yang akan menuju IKN nantinya? (misalnya DAMRI/KA Bandara)
 - d. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dan operasional dari setiap infrastruktur Bandara SAMS? Apakah seluruh sarana prasarana terbangun telah berfungsi/beroperasi secara optimal dan efektif?
5. Bagaimana koordinasi Bandara SAMS Sepinggan dengan setiap stakeholders transportasi?
6. Bagaimana implementasi regulasi, langkah, dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan protokol kesehatan di Bandara SAMS Sepinggan?
7. Hal lain yang ingin disampaikan mengenai penyelenggaraan transportasi udara dalam mendukung pembangunan IKN?

Terima kasih

**Rundown Liputan Majalah Transmedia Balikpapan
21-23 Agustus 2024**

No	Waktu	Lokasi	Kegiatan
Rabu, 21 Agustus 2024			
1	06.20 – 09.30	Jakarta - Balikpapan	Flight pagi menuju Balikpapan
2	10.00 – 11.00	Bandara Sepinggan	Liputan dan wawancara dengan EGM AP I
3	11.00 – 12.00	Kantor Otoritas Bandara	Wawancara dengan Kaotban
3	12.00 – 13.00		break ISHOMA
4	13.15 – 14.00	Kantor KSOP Balikpapan	Wawancara dengan Kepala KSOP
5	14.00 - selesai	Dermaga Sandy Jaya	Liputan kapal Pinisi di Dermaga Sandy Jaya
Kamis, 22 Agustus 2024			
1	08.00 – 10.00	Kantor BPTD Balikpapan	Wawancara Kepala BPTD
2	10.00 – 12.00		Perjalanan dari Terminal Batu Ampar Balikpapan – IKN dengan Bus Antarmoda
3	12.00 – 13.00	IKN	break ISHOMA
4	13.00 – 17.00	IKN	Liputan IKN
5	17.30 – 19.30		Perjalanan IKN- Balikpapan
Jumat, 23 Agustus 2024			
1	08.00-12.00	Kota Balikpapan	Liputan khas dan kuliner kota Balikpapan
2	13.30 – 14.40	Balikpapan - Jakarta	Flight menuju Jakarta

SURAT MASUK 2024



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-13696/D.05/PP.04/07/2024 25 Juli 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Penandaan Anggaran Responsif Gender
dalam Renja K/L TA 2025

Yth. Penerima Surat (*mohon lihat daftar terlampir*)
di
Tempat

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-612/MK.02/2024 – No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025 tanggal 19 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan RPJPN 2025-245, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 telah memandatkan pembangunan kesetaraan gender, yaitu kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Pembangunan kesetaraan gender penting dilaksanakan karena proporsi jumlah penduduk yang seimbang antara perempuan dan laki-laki yang semuanya perlu dioptimalkan potensinya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
2. Pembangunan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang dilaksanakan oleh seluruh K/L di tujuh proses pembangunan, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
3. Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab untuk memastikan integrasi perspektif gender di semua sektor pembangunan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu melalui penyusunan kebijakan dan program/kegiatan/rincian output (RO) yang responsif gender dalam RKP dan Renja K/L Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, agenda pembangunan kesetaraan gender menjadi bagian dari Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Perempuan
 - b. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.
 - c. Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 - d. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan
 - e. Penguatan Penyelenggaraan PUG di Proses Pembangunan
5. Strategi PUG dilaksanakan K/L dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/rincian output, melalui :

- a. Mengidentifikasi RO TA 2025 yang potensial berkontribusi dalam melaksanakan poin a, b,c,d dan e;
- b. Menyusun *Gender Action Budget* (GAB) melalui pengintegrasian perspektif gender dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana telah diatur dalam Permen PPN/Bappenas No. 2/2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Melakukan penandaan tematik APBN untuk Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten di aplikasi KRISNA dan SAKTI.

Adapun penjelasan secara teknis terkait PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan dapat dilihat pada Lampiran 2.

6. Berdasarkan hasil rekapitulasi penandaan tematik ARG TA 2025, belum seluruh K/L melakukan PUG dan penandaan ARG. Data Krisna Renja K/L TA 2025 (status per 1 Juli 2024) menunjukkan hanya 30 dari 82 K/L yang sudah melakukan penandaan ARG (Lampiran 3).
7. Sehubungan dengan itu, kami mohon Bapak/Ibu untuk: (a) mengidentifikasi dan membahas RO yang potensial ditandai sebagai ARG dalam pertemuan tiga pihak SBPA TA 2025; (b) mengoordinasikan dan memastikan penandaan ARG TA 2025 telah dilakukan di level RO dalam aplikasi Krisna Renja KL dan SAKTI; dan (c) memastikan kelengkapan dokumen RO yang ditandai ARG, yaitu **KAK yang responsif gender (GAB)**.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai PUG dan Penandaan ARG dapat menghubungi Sdri. Marsella (HP: [REDACTED]) atau Qurrota A'yun (HP: [REDACTED]). Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA
9. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA
10. Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA
11. Asisten Deputi PUG Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian PPPA
12. Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum, Kementerian PPPA



Lampiran 1 Surat

Nomor : B-13696/D.05/PP.04/07/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian/Lembaga

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
31. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
34. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
35. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
36. Sekretaris Jenderal Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
37. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN)
38. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
39. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
40. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS)

41. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG)
42. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
45. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN)
46. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
47. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
48. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
49. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
50. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN)
51. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
52. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN)
53. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
54. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN)
55. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
56. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB)
57. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
58. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
59. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas)
60. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla)
61. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
62. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
63. Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG)
64. Sekretaris Badan Pengusahaan Batam
65. Sekretaris Badan Pengusahaan Sabang
66. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
67. Sekretaris Jenderal MPR RI
68. Sekretaris Jenderal DPR RI
69. Sekretaris Jenderal DPD RI
70. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
71. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
72. Sekretaris Mahkamah Agung
73. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU)
75. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
76. Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengawas Pemilu (BAWASLU)
77. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI)
78. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
79. Sekretaris Jenderal Komisi Informasi Pusat
80. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
81. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
82. Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran (As Rena) Kepolisian RI
83. Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
84. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
85. Kepala Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
86. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Mahkamah Agung (MA)
87. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung
88. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Negara
89. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri
90. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri
91. Kepala Direktur Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan

92. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
93. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
94. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian
95. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian
96. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
97. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan
98. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
99. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
100. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama
101. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan
102. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
103. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
104. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
105. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPERA)
106. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
107. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
108. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
109. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
110. Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
111. Kepala Biro Perencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
112. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM
113. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
114. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
115. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Intelijen Negara (BIN)
116. Kepala Biro Perencanaan, Badan Siber dan Sandi Negara
117. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS)
118. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik (BPS)
119. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas
120. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
121. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI
122. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
123. Kepala Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra), Kepolisian RI
124. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
125. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
126. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
127. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional (BNN)
128. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
129. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

130. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
131. Kepala Biro Bagian Program dan Penyusunan Anggaran BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
132. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
133. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Mahkamah Konstitusi (MK)
134. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
135. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum, Badan Informasi Geospasial (BIG)
136. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, Badan Standarisasi Negara (BSN)
137. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
138. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol, Lembaga Administrasi Negara (LAN)
139. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional RI (ANRI)
140. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN)
141. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
142. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
143. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga
144. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
145. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
146. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Komisi Yudisial (KY)
147. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
148. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
149. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
150. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Teknik Luar Negeri, Badan SAR Nasional (BASARNAS)
151. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
152. Kepala Deputy Perencanaan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)
153. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama, Ombudsman RI
154. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
155. Kepala Biro Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam)
156. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
157. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kabinet
158. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum
159. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
160. Direktur Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
161. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP KPBPB Sabang)
162. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Keamanan Laut RI (BAKAMLA)
163. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
164. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Lampiran 2 Surat
Nomor : B-13696/D.05/PP.04/07/2024
Tanggal : 25 Juli 2024

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2025

1. PUG difokuskan di tingkat Rincian Output (RO), yaitu dengan menyusun RO yang responsif gender yang dibuktikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disebut dengan *Gender Action Budget* (GAB) sesuai format yang diatur dalam PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. PUG di proses perencanaan dan penganggaran akan memberikan manfaat bagi K/L dalam meningkatkan kualitas perencanaan program/kegiatan/RO dan pada akhirnya akan mendukung K/L dalam mencapai indikator kinerjanya, melalui:
 - a. Identifikasi permasalahan dan faktor penyebab yang lebih tepat;
 - b. Rumusan intervensi yang lebih tepat; dan
 - c. Identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat.
3. PUG dilaksanakan terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga tidak ada konsekuensi adanya tugas tambahan;
4. *Gender Action Budget* (GAB) disusun melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Mempelajari Renja K/L dan mengidentifikasi RO TA 2025 yang potensial berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan kesetaraan gender yang hasilnya;
 - b. Menyusun *Gender Action Budget* (GAB)
5. Proses identifikasi RO yang potensial berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan kesetaraan gender dilakukan melalui analisis gender di sektor masing-masing, dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi isu gender strategis sesuai dengan tugas dan fungsi K/L, baik melalui identifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender (beban ganda, stereotip atau pelabelan berbasis gender, subordinasi atau penomorduaan berbasis gender, kekerasan berbasis gender, marginalisasi atau peminggiran berbasis gender) dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Proses identifikasi isu strategis dilakukan dengan menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin maupun data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. Menganalisis faktor penyebab terjadinya isu gender strategis, baik di ranah masyarakat maupun ranah pemerintah;
 - c. Menyusun rencana aksi (rencana intervensi) sesuai tugas dan fungsi K/L untuk merespons faktor penyebab;
 - d. Mengidentifikasi program/kegiatan/RO di Renja K/L TA 2025, termasuk unit kerja level Eselon 1 dan 2 yang menjadi pengampu, yang hasilnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Daftar RO Potensial Ditandai Sebagai ARG TA 2025

No	Rencana Aksi (Rencana Intervensi)	Program	Kegiatan	RO	Pengampu Unit Kerja Es 1 dan 2)

- e. Contoh Rencana Aksi (Rencana Intervensi) yang potensial mendukung pembangunan kesetaraan gender dan ditandai sebagai ARG adalah sebagai berikut:

Agenda Pembangunan	Rencana Aksi
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses layanan Wajib Belajar 13 tahun, • pendidikan non-formal yang mencakup pendidikan <i>life skill</i> dan <i>soft skill</i>, • pengembangan kurikulum yang responsif gender • bimbingan karir di sekolah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan ibu, KB dan kesehatan reproduksi, • peningkatan partisipasi laki-laki dalam ber-KB, • peningkatan gizi, • perluasan cakupan jaminan sosial kesehatan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan keahlian kerja dan keterampilan perempuan, • pendataan pelaku usaha (terpilah), • layanan keuangan dan akses pemodal, • literasi keuangan, • literasi digital dan optimalisasi TIK dalam rantai bisnis usaha perempuan, • informasi pasar kerja yang merespons kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan • pengaturan jam kerja yang fleksibel) • penerapan dan pengawasan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang sama • kebijakan/upaya menurunkan ketimpangan upah antara perempuan dan laki-laki
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • pendidikan politik bagi perempuan • kebijakan/penguatan lingkungan strategis yang mendukung partisipasi perempuan di politik dan pengambilan keputusan
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan air bersih dan sanitasi • penyediaan transportasi yang ramah perempuan • penyediaan jalan/jembatan di lokasi yang sangat membutuhkan (misalnya lokasi dengan angka kematian ibu melahirkan tinggi), • penyediaan energi yang ramah perempuan • akses dan partisipasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan sarana prasarana
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan (medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial), • kampanye/promosi pencegahan kekerasan, • pelatihan/peningkatan kapasitas APH dan SDM layanan, dan lainnya.
Reformasi Birokrasi (khususnya kebijakan terkait pengelolaan SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan praktik-praktik budaya kerja yang inklusif – tempat kerja yang ramah keluarga dan inklusif; <i>work-life balance</i>, dan sesuai dengan budaya “BERAKHLAK” • pengaturan waktu kerja fleksibel • penyusunan dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan di tempat kerja • kebijakan cuti orang tua (termasuk cuti ayah bagi yang istrinya melahirkan) • akses setara pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengembangan <i>talent pool</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan sarana prasarana responsif gender, antara lain ruang laktasi dan <i>daycare</i>
Agama	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan materi bagi penyuluh agama yang mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan • Bimbingan perkawinan yang memuat kesetaraan gender dalam berkeluarga
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan partisipasi perempuan untuk pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
Politik luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan WNI di luar negeri, • Dukungan bagi UMKM Perempuan untuk menembus pasar luar negeri

6. *Gender Action Budget (GAB)* disusun untuk RO yang ada di Daftar RO Potensial ARG 2025 yang dihasilkan pada aktivitas di poin 5. GAB disusun sesuai format PMK No. 62/2023, sebagai berikut:

5) Format KAK/TOR

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 20XX**

Kementerian negara/Lembaga	:(1)
Unit Eselon I/II	:(2)
Program	:(3)
Sasaran Program	: (4)
Indikator Kinerja Program	:	1.....(5)
		2.....
Kegiatan	:(6)
Sasaran Kegiatan	:(7)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1.....(8)
		2.....
Klasifikasi Rincian Output	:(9)
Indikator KRO (opsional)	:	1.....(10)
		2.....
Rincian Output	:	1.....(11)
		2.....
Indikator RO (opsional)	:	1.....(12)
		2.....
Volume RO	:(13)
Satuan RO	:(14)

- A. Latar Belakang
 - 1. Dasar Hukum.....(15)
 - 2. Gambaran Umum(16)
- B. Penerima Manfaat.....(17)
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
 - 1. Metode Pelaksanaan.....(18)
 - 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.....(19)
- D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran.....(20)
- E. Biaya Yang Diperlukan.....(21)

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama (22)

NIP/NRP..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian/Lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program.
(3)	Diisi nama Program sesuai dengan dokumen Renja K/L.
(4)	Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program.
(5)	Diisi indikator Kinerja Program.
(6)	Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L.
(7)	Diisi Sasaran Kegiatan.
(8)	Diisi indikator Kinerja Kegiatan.
(9)	Diisi nama/nomenklatur Klasifikasi Rincian Output.
(10)	Diisi Indikator Klasifikasi Rincian Output (opsional).
(11)	Diisi nama/nomenklatur RO.
(12)	Diisi Indikator RO. (opsional)
(13)	Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas RO yang dihasilkan.
(14)	Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas RO sesuai dengan karakteristiknya
(15)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan RO yang akan dilaksanakan.
(16)	Diisi gambaran umum mengenai RO dan volumenya yang akan dilaksanakan/dicapai. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, dapat ditambahkan informasi yang memuat : (a) konteks/analisis situasi ketimpangan gender dari RO yang diusulkan (b) Rencana aksi dari <i>Gender Action Budget</i> yang diusulkan, termasuk penjelasan Komponen yang terkait dengan definisi <i>Gender Action Budget</i> (c) hasil yang diharapkan
(17)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L. Khusus RO yang mendukung pengarusutamaan gender dan memuat anggaran responsif gender, ditambahkan informasi mengenai data terpilah berdasarkan jenis kelamin/daerah/kelompok umur.
(18)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(19)	Diisi dengan tahapan yang digunakan dalam pencapaian RO,
(20)	Diisi dengan kurun waktu pelaksanaan pencapaian RO.
(21)	Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian Keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.
(22)	Diisi dengan nama KPA/penanggung jawab kegiatan.
(23)	Diisi dengan NIP/NRP KPA/penanggung jawab kegiatan.

7. *Gender Action Budget* disusun dengan memperhatikan karakteristik, Jenis dan Satuan Klasifikasi Rincian Output (KRO), sebagai berikut:

KRO	CONTOH INTEGRASI GENDER
Kerangka Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun norma aturan yang responsif gender dengan mengacu pada Permen PPPA No 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya • membuka akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi publik penyusunan peraturan perundangan, • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin
Kerangka Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • integrasi gender dalam standar pelayanan publik • pemenuhan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara lain metode pemberian layanan jempot bola, penyediaan layanan khusus perempuan, • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Kerangka Investasi Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • akses dan manfaat, antara lain melalui desain infrastruktur yang inklusif dan responsif gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, • penyediaan sarana dan prasarana responsif gender di daerah terpencil, • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Untuk Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan akses dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, antara lain melalui metode kuota bagi peserta perempuan (misalnya minimal 30%), • pelibatan perempuan atau kelompok perempuan di dalam berbagai kegiatan, • penyediaan tempat bermain anak di lokasi pelatihan, training dengan metode hibrid antara daring dan luring. • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Untuk Administrasi Internal Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan sarana dan prasarana responsif gender (ruang laktasi dan tempat penitipan anak), • meningkatkan akses dan partisipasi pegawai perempuan di jabatan pimpinan, • kebijakan kepegawaian yang ramah keluarga, • dukungan kegiatan pelebagaan PUG di internal K/L • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Administrasi Internal Pemerintahan (antar K/L dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah,	<ul style="list-style-type: none"> • melalui dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PUG dari Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dituangkan dalam NSPK • integrasi gender dalam transfer ke daerah • pembinaan dan pengawasan dari K/L kepada provinsi terkait pelaksanaan PUG • penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Lampiran 3 Surat

Nomor : B-13696/D.05/PP.04/07/2024

Tanggal : 25 Juli 2024

**DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MELAKUKAN PENANDAAN ARG
DALAM SISTEM INFORMASI KRISNA RENJA K/L TAHUN ANGGARAN 2021-2025**

No	Kementerian/Lembaga	ARG TA 2021 ¹⁾ (Ribu)	ARG TA 2022 ²⁾ (Ribu)	ARG TA 2023 ³⁾ (Ribu)	ARG TA 2024 ⁴⁾ (Ribu)	ARG TA 2025 ⁵⁾ (Ribu)
1	MAHKAMAH AGUNG	-	-	35.569.644	36.352.835	61.263.447
2	SEKRETARIAT NEGARA	6.942.450	6.442.807	6.740.186	7.234.161	6.866.513
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	478.187	1.400.000	23.430.602	26.496.924	36.567.646
4	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	926.863	135.756.863	128.077.003	691.923.033	1.061.668.047
5	KEMENTERIAN PERTAHANAN	-	-	-	-	107.500
6	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	1.631.721	2.054.609	2.366.241
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.884.552	2.093.888.075	2.638.799.615	1.077.709.686	1.667.699.811
8	KEMENTERIAN PERTANIAN	29.826.957	1.290.436.728	1.048.971.928	1.198.390.739	442.210.760
9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	374.412.442	739.285.288	546.053.633	168.276.292	200.183.982
10	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.120.428.829	5.153.712.443	6.304.684.254	5.799.844.438	1.241.473.672
11	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.100.453	746.940	-	-	-
12	KEMENTERIAN AGAMA	-	6.961.047	19.810.237	13.951.839	24.316.716
	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	13.951.839	-
13	KEMENTERIAN SOSIAL	28.782.227.726	28.755.388.222	28.735.327.669	-	-
14	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134.060.069	2.097.280.138	2.039.573.290	2.200.470.381	1.187.492.839
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	232.251.928	418.283.130	628.683.698	662.070.069	1.187.542.839
16	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	96.076.000	22.315.844.298	26.686.002.887	30.424.775.190	19.005.976.887
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	-	22.224.047	18.751.063	20.757.087	10.486.828
18	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	73.229.708	61.450.000	58.087.770	58.909.042	68.719.520
19	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	447.006.358	376.381.183	216.234.452
20	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	581.576	354.008	-
21	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.650.000	95.891.865	116.118.966	146.533.477	126.422.853

No	Kementerian/Lembaga	ARG TA 2021 ¹⁾ (Ribu)	ARG TA 2022 ²⁾ (Ribu)	ARG TA 2023 ³⁾ (Ribu)	ARG TA 2024 ⁴⁾ (Ribu)	ARG TA 2025 ⁵⁾ (Ribu)
22	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	-	711.826	-	-
23	BADAN PUSAT STATISTIK	5.436.651	3.739.091	5.605.882	6.021.426	5.785.583
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	-	8.219.254	12.424.259	13.954.354	3.000.000
25	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	83.797.062	136.388.710	244.568.594	156.608.204	313.203.621
26	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	32.568.207	41.336.200	39.554.800	35.782.036	37.271.507
27	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3.130.000	3.400.000	5.455.000	5.600.000	0
28	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	-	89.157.279	108.380.918	-	13.172.299
29	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	2.823.235	5.000.000	-	-
30	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.007.180	3.836.000	3.534.000	3.734.000	3.037.250
31	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	4.462.710	3.850.000	2.004.561	8.527.672
32	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.402.313	14.455.466	19.633.220	7.444.104	4.303.350
33	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	24.240.894	24.240.894	3.000.000
34	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	12.396.400	35.953.161	43.555.638	17.841.380	282.509.794
35	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	73.696.175	20.986.362	3.352.892	22.134.636	-
36	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	12.309.136	18.031.629	19.314.385	16.250.495
37	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	15.361.677	-	-	-
Total		38.125.830.152	63.611.442.726	70.021.801.652	43.251.774.397	27.237.662.123

Sumber: 1) Data Krisna per tanggal 30 Maret 2021; 2) Data Krisna per tanggal 17 November 2021; 3) Data Krisna per tanggal 13 Desember 2022; 4) Data Krisna per tanggal 8 Maret 2024; 5) Data Krisna per tanggal 1 Juli 2024

Catatan: Untuk Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk dalam tabel, maka belum pernah melaksanakan penandaan ARG pada periode tahun 2021-2025.



**KELOMPOK STUDI PASAR MODAL
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL**

JL. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting), Fax.: 7802718, 7802719
Email: kspmfebunas@gmail.com



Nomor : 249/BPH-FEBUNAS/IX/2024

Jakarta, 02 September 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Kunjungan Kementerian Perhubungan RI**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Perhubungan RI

Di Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan segala aktivitasnya. Melalui perantara surat ini, kami dari Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Nasional bermaksud untuk mengadakan kunjungan studi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adapun maksud dari kunjungan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai kebijakan yang terkait dan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Maka dari itu, kami mengajukan permohonan ini sebagai bentuk dukungan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 September 2024

Waktu : 13.00 – 15.10 WIB

Jumlah Peserta : 100 Orang

Mohon sekiranya Bapak/Ibu Kepala Kementerian Perhubungan RI dapat memberikan konfirmasi kunjungan kepada kami setelah surat ini diterima, dan dapat menghubungi Contact Person: [REDACTED] - Fachrisa Afiah. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Pelaksana

Muhammad Firli Ramadhan

Sekretaris Pelaksana

Piya Syawala Dehan

Mengetahui,

**Kepala Galeri Investasi
Universitas Nasional**

Adillah Permana, S.E., M.Sc., AFA

**Ketua KSPM
Universitas Nasional**

Ubaidillah Mahdi

Tembusan:

- Arsip

Nomor Surat : 662/JNS/PB-JAYAPURA/III/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penerbitan Buku & E-book
JAYAPURA OUTLOOK 2024
Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Jayapura

Jayapura, 11 Maret 2024

Kepada Yth,
KEPALA
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
di
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka percepatan program Pemerintah Kota Jayapura dalam mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan di Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura Bersama PT Jos Nesha Sejati bermaksud menerbitkan buku dan e Book dengan judul **JAYAPURA OUTLOOK 2024 - Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Jayapura** berdasarkan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penjabat Walikota Jayapura Nomor : 848/0390 Tanggal 04 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Kegiatan Penerbitan Buku dan e-Book.
2. Memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik tentang kinerja Pemerintah Daerah, Capaian Pembangunan, Potensi Investasi Raihan prestasi juga pembangunan yang berkelanjutan di Kota Jayapura.
3. Penerbitan buku dimaksud dilakukan secara swadana, kami mengharapkan dukungan serta partisipasi Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk memanfaatkan media publikasi ini sebagai sarana promosi dan komunikasi melalui pemasangan display iklan/produk/artikel corporate social responsibility yang akan dimuat dalam buku tersebut sebagai simbol harmonisasi dan kebersamaan dalam mendukung program kerja Pemerintah Kota Jayapura.

Untuk Konfirmasi Sponsorship Dapat Menghubungi :

Mangara G.S

Hp. [REDACTED]

Koordinator Sponsorship

Bapak. Efik Agus Satria

Hp. [REDACTED]

Kasubag Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Jayapura

Demikian surat ini kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami



Jayapura Outlook 2024
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jayapura

Bertio Joshua
Ketua Pelaksana



WALIKOTA JAYAPURA

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 848 / 0390

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. FRANS PEKEY, M.Si**
Jabatan : **PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA**
Alamat : **Jl. Balai Kota Nomor. 01 Entrop, Jayapura - Papua**

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **PT. JOS NESHA SEJATI**
Alamat : **Jl. Pedongkelan Depan, RT.002/RW.015, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.**

Dalam rangka percepatan program Pemerintah Kota Jayapura guna mendorong peningkatan minat investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan sektor unggulan daerah di Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan PT. Jos Nesha Sejati bermaksud menerbitkan buku dan e-Book dengan judul :

JAYAPURA OUTLOOK 2024

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jayapura

Buku dan e-Book ini dimaksudkan dalam rangka penyebaran informasi pencapaian kinerja pemerintahan dalam pembangunan serta potensi dan pesona alam yang melimpah di Kota Jayapura. Demi terwujudnya penerbitan buku dan e-Book tersebut, kami mengajak dan mengharapkan dukungan serta partisipasi pihak Perusahaan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin agar dapat memanfaatkan media publikasi ini sebagai sarana promosi melalui pemasangan display iklan produk barang / jasa Advertorial CSR sekaligus sebagai simbol harmonisasi dan kebersamaan atas keberadaan Perusahaan dan Instansi yang saudara pimpin di Kota Jayapura.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Jayapura, 4 Maret 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

Dr. FRANS PEKEY, M.Si.

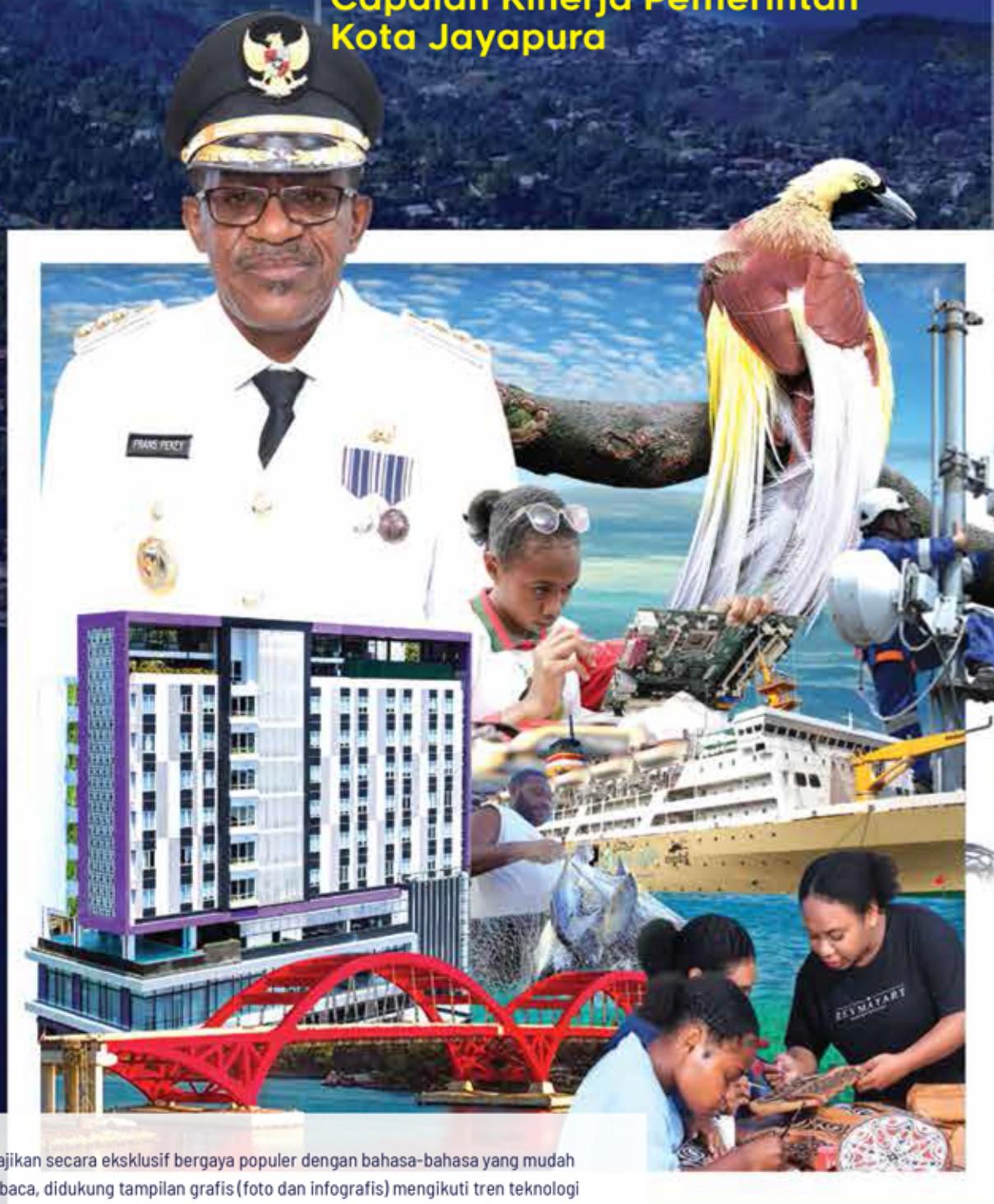


PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA

Jayapura Outlook

2024

Capaian Kinerja Pemerintah
Kota Jayapura



Buku akan disajikan secara eksklusif bergaya populer dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami pembaca, didukung tampilan grafis (foto dan infografis) mengikuti tren teknologi informasi saat ini, untuk memudahkan penyampaian informasi lebih efektif dan efisien.

BERSAMA WUJUDKAN KOTA JAYAPURA MENUJU MASYARAHAT YANG MODERN DAN SEJAHTERA

Kota Jayapura memiliki sejarah yang sangat kaya dan mengandung berbagai keunikan budaya dan alam. Kota ini merupakan pusat budaya dan seni, di mana Anda dapat menikmati berbagai kebudayaan lokal, seperti tari dan musik tradisional.

Kota Jayapura memiliki infrastruktur yang sangat baik, termasuk akses ke bandara dan pelabuhan, serta koneksi ke internet yang cepat. Kota ini juga memiliki berbagai fasilitas, seperti hotel, restoran, dan toko, yang memungkinkan Anda untuk merasa nyaman saat di Kota Jayapura.

Pembangunan di Kota Jayapura telah mengalami perkembangan dengan peningkatan pelayanan jasa dan infrastruktur, yang bertujuan untuk peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas publik.

Strategi Pemerintah Daerah Kota Jayapura, berupaya menyajikan data yang akurat dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber yang tepat, Pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat membuat strategi yang efektif untuk menyajikan data yang akurat dan mudah diakses masyarakat luas.

Melalui penerbitan Buku dan e-Book **Jayapura Outlook 2024 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jayapura** menjadi media komunikasi dan informasi pemerintah daerah pada masyarakat luas dan industri serta sebagai rujukan bagi pelaku usaha nasional dan daerah serta investor dalam mendapatkan informasi dalam upaya mendukung program pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura sehingga wilayah ini semakin modern.



SPESIFIKASI MEDIA



MEDIA BUKU

- **Judul**
JAYAPURA OUTLOOK 2024
CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA
- **Tebal Halaman**
150 s/d 200 Halaman
- **Desain**
Populer
- **Bahan Kertas**
Art Paper 100 Gram
- **Ukuran Buku**
21 x 28 cm
- **Sampul Depan**
Art Cartoon Laminating



MEDIA E-BOOK

- **Judul**
JAYAPURA OUTLOOK 2024
CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA
- **Format**
Animation Slide Interactive Ebook
- **Package**
Kompatible dengan Windows dan
Mac OS (Exe & Apk) Flashdisk Ekklusif

RENCANA ISI BUKU

Sambutan

Pj.Wali Kota Jayapura

Pengantar

Sekretaris Daerah Kota Jayapura

Menyapa Kota Jayapura

Mengenal lebih dekat Kota Jayapura, letak geografis, topografi, demografi, adat istiadat dan budaya serta gambaran umum lainnya

Visi dan Misi Pemerintah Kota Jayapura

Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri, dan Modern Berbasis Kearifan Lokal

Mengulas berbagai program dan capaian pembangunan Kota Jayapura untuk mewujudkan visi pemerintahan "Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri, dan Modern Berbasis Kearifan Lokal."

Membangun Kota yang Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman

Memaparkan berbagai proyek infrastruktur di Kota Jayapura yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta konektivitas antarwilayah.

Jayapura Smart City

Akselerasi transformasi digital pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Jayapura Smart City

Berbagai Potensi di Kota Seribu Pinang

Mengulas berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Jayapura dan upaya untuk mengoptimalkan demi meningkatkan daya saing daerah

Pesona Port Numbay

Berbagai potensi di sektor pariwisata, baik itu destinasi wisata unggulan, budaya, hingga ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura

DISTRIBUSI BUKU

INSTANSI PEMERINTAH

Kementerian, Lembaga, Indonesia Promotion Center, Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota yang ada di Provinsi Papua.

TAMU TAMU PEMERINTAHAN KOTA JAYAPURA

Mitra Strategis Pemerintah Kota Jayapura, Kedutaan Besar Negara Sahabat Yang Ada di Indonesia, Tokoh Masyarakat, Serta Tamu Tamu Khusus Pemerintah Kota Jayapura

DUNIA USAHA

Pelaku Ekonomi, Pelaku Industri, Perhotelan, Perbankan, BUMN/BUMD, Kadin Pusat, Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota yg ada di Provinsi Papua.

PARTISIPASI DAN PROMOSI

PAKET GOLD

Rp. 100.000.000,-

- Logo Institusi/Perusahaan disampul Depan Buku
- 6 (enam) Halaman Artikel
- 1 Halaman Iklan pada Halaman Depan
- 1 Halaman Iklan pada Pembatas BAB
- 1 Buah Plakat khusus dari Pemerintah Kota Jayapura
- Logo di 1000 pcs Goody Bag

PAKET SILVER

Rp. 75.000.000,-

- Logo Institusi/Perusahaan disampul Depan Buku
- 4 (empat) Halaman Artikel
- 1 Halaman Iklan Pada Pembatas BAB
- 1 Buah plakat khusus dari Pemerintah Kota Jayapura
- Logo di 500 Pcs Goody Bag

RUANG IKLAN

UKURAN

NILAI KOMPENSASI

1/2 Halaman

19 x 13 cm

Rp. 15.000.000,-

1 Halaman

19 x 26 cm

Rp. 20.000.000,-

1 Halaman Pembatas Bab

19 x 26 cm

Rp. 25.000.000,-

Dibalik Sampul Muka

19 x 26 cm

Rp. 45.000.000,-

Halaman Muka 1

19 x 26 cm

Rp. 40.000.000,-

Halaman Muka 2

19 x 26 cm

Rp. 35.000.000,-

Dibalik Sampul Belakang

19 x 26 cm

Rp. 35.000.000,-

Dibalik Sampul Belakang 1

19 x 26 cm

Rp. 30.000.000,-

2 Halaman Artikel

2 x 19 x 26 cm

Rp. 25.000.000,-

Logo Di halaman Muka

1.5 x 3 cm

Rp. 20.000.000,-

Back Cover

Full Page

Rp. 60.000.000,-

INFORMASI PARTISIPASI & PROMOSI

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA JAYAPURA

JL. Balai Kota No.1 Entrop, Kota Jayapura



Mangara G.S



Efik Agus Satria

Formulir Partisipasi & Materi Iklan Dapat di Email Ke:

Email : jayapuraoutlook@gmail.com

FORMULIR DUKUNGAN

PENERBITAN BUKU

JAYAPURA OUTLOOK 2024

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Jayapura

Nama Institusi :
Nama & Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia memberikan dukungan pada penerbitan buku:

JAYAPURA OUTLOOK 2024
CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Bentuk dukungan : Paket GOLD Paket SILVER
 Checklist bentuk dukungan yang dipilih Iklan, lain-lain,

Ruang Iklan :
Ukuran :
Nilai : Rp
Terbilang :
.....

PROSEDUR PARTISIPASI DAN PROMOSI :

Pembayaran dilakukan melalui transfer/giro
ditujukan ke rekening AC. No. 1500 1100 0703 4
atas nama PT JOS NESHA SEJATI pada
BANK PAPUA

Petugas

Pemesan



(.....)
M A N G A R A
Hp. [REDACTED]

(.....)
Tanda Tangan / Cap Perusahaan

- Formulir dukungan harus diisi rangkap 2 (dua): rangkap pertama (asli) untuk penerbit, rangkap kedua untuk pemasang iklan
- Pembayaran telah sah berdasarkan kwitansi resmi dari penerbit dengan dilampiri form order asli
- Order berdasarkan kesepakatan dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak
- Tidak dibenarkan memberikan sumbangan apapun kepada petugas pelaksana



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email: kemenkomaritim@maritim.go.id

Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024

29 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kemenko Marves

Kepada Yth
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Bapak/Ibu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Bapak/Ibu mengenai seleksi dimaksud. Selanjutnya informasi persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui *website* <https://maritim.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator,



Odo R.M Manuhutu

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan).

Lampiran Surat

Nomor : B-0762/SESMENKO/KP.03/VII/2024

Tanggal : 29 Juli 2024

A. Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
25. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf);
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
31. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
32. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

B. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

C. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

D. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
9. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
10. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
12. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
13. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
14. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
15. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN);
16. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
17. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
18. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
19. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
20. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
21. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
22. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
23. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
24. Sekretaris Utama Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
25. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia (BARANTIN);
26. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BAPANAS);

E. Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan.

No. : 244/SPA_DIGIMIND/IX/2024
Lamp. : 2

Jakarta, 09 September 2024

Kepada yth,
**Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Kementerian Perhubungan
Jl. Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat Gd. Cipta Lantai 5**

Perihal :

Permohonan Audiensi dan Kerjasama Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN

Dengan Hormat,

Kami, **Asosiasi Digital Marketing Indonesia (DIGIMIND)** dengan ini mengajukan permohonan ingin bersilaturahmi dan beraudiensi kepada **Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan** tentang Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk **Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN**.

Adapun latar belakang kami mengajukan permohonan audiensi ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan riset bulan September 2023, Skill Digital Marketing menjadi skill yang paling dibutuhkan oleh dunia Bisnis dan Industri, yaitu sebesar 31.752 dan menempati posisi pertama dari kebutuhan di dunia industri. (*detik.com tgl 14 September 2023*)
2. Hampir 90% masyarakat Indonesia yang terkoneksi secara digital MAYORITAS hanya menjadi konsumen teknologi (melakukan transaksi online), dimana digital menjadi tempat untuk membelanjakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan offline. Sehingga ketahanan ekonomi digital di Indonesia belum mencapai impian yang diharapkan.
3. Jumlah pelaku industri usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memiliki kemampuan berbasis kompetensi nasional di Bidang Digital hanya 10% dari kebutuhan kegiatan industri usaha dan ekonomi di Indonesia.
4. Pegawai memasuki usia pensiun mengalami kesulitan dalam hal finansial di karenakan sudah tidak lagi memiliki pendapatan tetap seperti pada saat masih bekerja.
5. Dan disaat yang sama, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini dari tahun 2022 **Asosiasi Digital Marketing Indonesia melaksanakan program Pelatihan Digital Marketing Berbasis Kompetensi Nasional** dan telah melakukan *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan berbagai kampus baik negeri maupun swasta dan juga dengan beberapa kementerian

Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk **Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN** adalah Program Khusus Asosiasi Digital Marketing Indonesia dan LSP untuk mengembangkan kemampuan SDM dan ASN di bidang literasi Digital yang Profesional dengan Kualifikasi dan Kompetensi Nasional.

Office :

 Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17th Floor, Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 52
Jakarta Selatan 12190

 (021) 515 7724
(0812) 8860 6110

Dimana lulusan pelatihan sertifikasi “Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional” ini dilengkapi dengan gelar non akademik yaitu Certified Digital Marketer (CDM) dari LSP Digital Marketing Indonesia P3 yang didirikan oleh Asosiasi Digital Marketing Indonesia dengan No: (SK BNSP : KEP.1049/BNSP/V/2022).

Besar harapan kami dapat bertemu dan beraudiensi dengan **Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan** untuk membahas kemungkinan kerja sama dalam Program Pelatihan Sertifikasi Digital Marketing berbasis Kompetensi Nasional untuk **Peningkatan Soft Skill Kepegawaian dan ASN**.

Adapun Jadwal Audiensi yang kami ajukan adalah:

- Hari/Tanggal : September 2024
- Jam : 10.00 s/d Selesai
- Tempat : Tatap muka

Jadwal audiensi kami menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tempat yang Bapak/Ibu berikan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor sekretariat Asosiasi Digital Marketing Indonesia [REDACTED] (**Gusti**) atau [REDACTED] (**Hani**). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



DIGIMIND

Dian Martin Sudiana
Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia

MATERI PELATIHAN

No	Planned final ability (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Study Materials/ Content (Materi Pelatihan)	Learning Experience (Pengalaman Pembelajaran)	Indikator Penilaian
1	Mampu memahami digital marketing strategi, Riset market, marketing chanel sertamampu membuat kampanye pemasaran digital	Digital Marketing Roadmaps & Strategi <ul style="list-style-type: none"> • <u>Konsep</u> digital Marketing • Strategy Digital marketing • Analisis Produk menggunakan Bigdata(dimia.id) 	Peserta akan melakukan risetmarket menggunakan aplikasi big data dimia.	Pembuatan Konten Video Penyerahan Tugas
2	Mampu merancang dan membuat landing page dengan wordpress untuk mendapatkan data base pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Domain & Hosting • Pengenalan CMS Wordpress • Instansi Wordpress • Install Theme & plugin Wordpress • Membuat Landing Pages 	Peserta akan memahami bagaimana cara mudah membuat landing page Peserta akan memiliki website pribadi	Pembuatan Konten Video Penyerahan Tugas
3	Mampu membuat konten menggunakan aplikasi CANVA	<u>Membuat Banner dengan CANVA</u> <u>Membuat Desain dengan CANVA</u>	Peserta akan memahami bagaimana cara mudah membuat <u>desain banner sendiri</u>	Banner Konten
4	Mampu melakukan riset keyword dan membuat konten sesuai dengan kaidah SEO	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Search Engine Optimization • Riset Keyword Menggunakan dimia.id • Mengintegrasikan Google analytics dan Google search Console 	Peserta akan <u>memahami</u> apa itu seo dan cara kerja mesin pencari Google Peserta akan memahami cara membaca data dari Google analytics dan Google search Console	Berhasil mengintegrasikan Google analytics dan Google Search Console Membuat artikel SEO
5	Mampu melakukan optimasi SEO On Page & SEO Off Page	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Plugin Yoast SEO • Pengenalan SEO On Page & SEO Off Page • Optimasi SEO On Page & SEO Off Page 	Peserta akan memahami apa itu yoast SEO Peserta akan memahami Teknik SEO On Page & SEO Off Page	Membuat artikel SEO
6	Mampu Memahami Membuat konten untuk social media Mampu membuat kampanye iklan yang menarik di Facebook Ads dan Instagram Ads	Social Media Marketing <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pengenalan dasar dasar jenis media sosial</u> • <u>Cara Posting di media sosial</u> • <u>membuat iklan di media sosial</u> • Analisis Konten Dengan Big Data(dimia.id) 	Peserta akan <u>memahami</u> bagaimana cara membuat konten Peserta memahami bagaimana cara membuat kampanye promosi di social media	Upload <u>Konten</u>

No	Planned final ability (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Study Materials/ Content (Bahan Kajian)	Learning Experience (Pengalaman Pembelajaran)	Indikator Penilaian
7	Mampu memahami cara menentukan Audience di Facebook (Core Audience, Custom Audience, Lookalike Audience)	Facebook Fixel Remarketing	Mengenal Facebook fixel dan Remarketing	Hasil Pembuatan Kampanye Iklan
8	Mampu memahami cara membuat kampanye iklan dengan menggunakan google ads	Search Engine Marketing Analisis keyword menggunakan Big data(dimia.id)	Memahami SEM Membuat kampanye Google Ads	Hasil Pembuatan Kampanye Iklan
9	Mampu memahami cara mengintegrasikan Google Ads Konversi dan remarketing	Google Ads Konversi dan Remarketing	Memahami Konversi dan remarketing Membuat kampanye Google Ads Video	Hasil Pembuatan Kampanye iklan video
10	Mampu memahami marketing analytics dengan menggunakan Google analytics dan report iklan	Marketing analytics dengan Bigdata(dimia.id)	Memahami laporan analytics seo dan sem	Hasil pembuatan laporan iklan

Unit Kompetensi Digital Marketing yang akan Di Ujikan oleh LSP BNSP

Daftar Unit Kompetensi sesuai Kemasan:

No.	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Internasional, Standar Khusus, SKKNI)
1.	J.63OPR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer	SKKNI
2.	J.63OPR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser)	SKKNI
3.	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client)	SKKNI
4.	J.63OPR00.009.2	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (Internet Based Applications Literacy)	SKKNI
5.	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial	SKKNI
6.	M.70MKT00.009.2	Merencanakan Riset Terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek	SKKNI
7.	M.70MKT00.010.2	Mengolah Data Riset	SKKNI
8.	M.70MKT00.012.1	Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools)	SKKNI
9.	M.70MKT00.013.1	Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital	SKKNI
10.	M.70MKT00.014.1	Mempersiapkan Konten Digital	SKKNI
11.	M.70MKT00.017.1	Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek	SKKNI
12.	M.731000.001.01	Membuat Perencanaan Periklanan	SKKNI
13.	M.731000.003.01	Merencanakan Strategi Kreatif dan Pembuatan Iklan	SKKNI



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2502/PC.01.02-K2/VIII/2024

26 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Permintaan Dokumen

Yth. Menteri Perhubungan

Jl. Medan Merdeka Tim. No.5, RT.6/RW.1, Gambir

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud, Ombudsman saat ini sedang melaksanakan kajian mengenai Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan itu, Ombudsman Republik Indonesia bermaksud meminta sejumlah dokumen pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang RAN PPTPO Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam surat ini. Kami berharap dokumen dimaksud dapat disampaikan secara langsung (dokumen fisik) atau melalui surat elektronik di team2@ombudsman.go.id paling lambat 14 (empat belas hari) sejak diterimanya surat ini.

Untuk konfirmasi lebih lanjut, dapat menghubungi Keasistenan Utama II (██████████). Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,



Mokhammad Najih

Lampiran Surat

Nomor : B/2502/PC.01.02-K2/VIII/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

Hal : Permintaan Dokumen

No.	Aksi PPTPPO	Target Dokumen Tahun 2020-2024
1.	Sinkronisasi kewenangan pengawasan dan pemeriksaan HAM di kapal perikanan dan unit pengolahan ikan	1 laporan kegiatan/tahun pada Tahun 2022 – 2024
2.	Pelaksanaan pemantauan dan pencegahan TPPO di bandara, pelabuhan laut, serta perbatasan perairan dan daratan di wilayah yurisdiksi Indonesia	Dokumen/tahun



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2176/PW.01.04/VII/2024

18 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penerapan Nilai Ombudsman dan Larangan Memberikan Gratifikasi kepada Insan Ombudsman

Yth. Bapak/Ibu

1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Para Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Para Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah
5. Para Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik Lainnya

Dalam rangka membangun integritas dan mengimplementasikan Nilai Ombudsman yang berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan Insan Ombudsman yang berintegritas, profesional, dan adil, Ombudsman RI telah menetapkan Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman dan Peraturan Ombudsman Nomor 45 Tahun 2020 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Ombudsman RI.
2. Berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019, seluruh Insan Ombudsman dalam bersikap, berindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari harus berlandaskan pada Nilai Dasar ASN, Nilai Ombudsman (Integritas, Profesional, dan Adil) serta kode etik dan kode perilaku yang dibangun berdasarkan Nilai Ombudsman.
3. Terkait hal tersebut, dengan ini kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu agar memberikan dukungan kepada segenap Insan Ombudsman untuk senantiasa menjaga integritas kami dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Seluruh Insan Ombudsman telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik secara berintegritas, profesional, dan adil.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu semua, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia,



Mokhammad Najih



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON/FAKSIMILI: (021) 7806570 / 7817611

WEBSITE: <http://ditsayur.hortikultura.pertanian.go.id>

E-mail: ditsayurobat@pertanian.go.id

Nomor : B-597/TU.020/D.4/08/2024

23 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Audiensi

Yth.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

di

Tempat

Dalam rangka upaya penanganan inflasi cabai nasional, perlu dilakukan pembahasan bersama antar K/L serta melibatkan *stakeholder* lainnya yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat bermaksud untuk melaksanakan Audiensi dengan topik "Mendorong Kerjasama Antara Champion dengan Daerah Defisit Cabai", pada :

Hari/tanggal : Rabu / 28 Agustus 2024

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gd. Karsa Lt. 7 Jakarta Pusat

Adapun kesediaan waktu dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Diana di *Whatsapp* [REDACTED]. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat



Andi Muhammad Idil Fitri, SE, MM
NIP 196912111997031003



YAYASAN CAKRA ABHIPRAYA RESPONSIF
Jl. Kapten Tendean No. 22 RT.001/RW.001, Pela Mampang
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
(12720) Telp: 0812 – 1212 – 8095

No : 016/SPP/CAR/PUSAT.PPG/VII/2024
Lamp. : 1 (Satu) Berkas
Hal. : **Surat Permohonan Audiensi**

Jakarta, 25 Juli 2024

Kepada Yth.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Departemen CSR

Bapak/Ibu

di Tempat

Dengan Hormat,

Segala puji bagi Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini.

Cakra Abhipraya Responsif merupakan Yayasan Sosial yang berfokus dalam bidang Anak, Kebencanaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan. Berkaitan dengan program “**Ekspedisi Kemanusiaan Papua Menanam**” dengan melakukan pembangunan sekolah alam yang di konsep sebagai edukasi center di Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 bersama **Windah Basudara** dan **Sania Leonardo**.

Kami bermaksud ingin mengajukan audiensi kepada Bapak/Ibu **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia** terkait program tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, adapun kami lampirkan 1 (satu) berkas proposal. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Yayasan Cakra Abhipraya Responsif melalui Sdri. Nini Sephia [REDACTED].

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan YME. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Cakra Abhipraya Responsif

Putro Anugrah Lindu

YouTube : Cakra Abhipraya Responsif

Instagram : @cakraabhipraya



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat 10110
E : dit.astara@kemlu.go.id

T : (6221) 344 1508
F : (6221) 223 45501
W : www.kemlu.go.id

Jakarta, 3 Mei 2024

Nomor : 07571/BK/05/2024/28
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Informasi
Persetujuan Brunei Darussalam
untuk Penerbangan Air Asia
Indonesia

**Yth. Direktur Angkutan Udara
Kementerian Perhubungan**
di

Jakarta

Merujuk berita KBRI Bandar Seri Begawan nomor B-00142/BS Begawan/240427 (terlampir), bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa KBRI Bandar Seri Begawan telah menerima surat balasan Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 1 April 2024 yang pada intinya menyampaikan bahwa proses persetujuan atas permohonan FOAC PT Indonesia Air Asia telah selesai dan telah disetujui.

Sehubungan hal ini, mohon bantuan Kementerian Perhubungan untuk dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
Direktur Asia Tenggara



Mirza Nurhidayat

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (sebagai laporan).
2. Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
3. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri.



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANDAR SERI BEGAWAN**

Simpang 336-43, Kg. Kawasan Diplomatik, Mukim Kianggeh, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Telp: (673) 2330180, Fax : (673) 2330646,
Website : www.kemlu.go.id/bandarseribegawan,
Email : bsbegawan.kbri@kemlu.go.id atau kbribsb@brunei.bn

Kepala Perwakilan R.I

BERITA BIASA



Prof. Dr. Achmad Ubaedillah
Duta Besar LBBP

Nomor : B-00142/BS Begawan/240427
Kepada Yth. : Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan
Up Yth : Dirjen Aspasaf, Direktur Astara, Dirjen Perhubungan Udara
Info Yth. : Wamenlu, Direktur Angkutan Udara
Dari : Kepala Perwakilan RI Bandar Seri Begawan
Jumlah : 3 (tiga) halaman
Perihal : Persetujuan Air Asia Indonesia

Merujuk perihal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 April 2024, KBRI Bandar Seri Begawan telah menyampaikan salinan surat Menteri Perhubungan RI tertanggal 29 Maret 2024 mengenai Konektivitas Perhubungan Udara antara Indonesia dan Brunei, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei.
2. Selanjutnya, KBRI telah menerima Salinan surat balasan dari Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 1 April 2024, yang pada intinya menyampaikan bahwa proses persetujuan atas permohonan FOAC PT. Indonesia Air Asia telah selesai dan telah disetujui.
3. Sehubungan dengan itu, mohon bantuan menyampaikan informasi dimaksud kepada pihak-pihak berkepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Petugas Komunikasi

Risna Rahmawati

Pembuat Berita

Timbul Situmorang
Minister Counsellor

Tel. : (673) 2381064
Faks : (673) 2383636



منترى نقل و اتصالات
MENTERI PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI
Minister of Transport and Infocommunications
Bandar Seri Begawan BB3910
Negara Brunei Darussalam

MTIC/19

21 Ramadhan 1445
1 April 2024

H.E Budi Karya Sumadi
Minister of Transportation
Ministry for Transportaion
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Pusat 10110, Jakarta
Republic of Indonesia

Your Excellency,

**AIR TRANSPORT CONNECTIVITY BETWEEN INDONESIA
AND BRUNEI DARUSSALAM**

The Ministry of Transport and Infocommunications of Brunei Darussalam extends its compliments to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and appreciates the close working relationship between ourself, our two organisations and countries.

I have the pleasure to refer to Your Excellency's letter reference No: UM. 006/4/5/STJ/2024 dated 29th March 2024 regarding the above subject matter and in particular relating to PT Indonesia AirAsia application for a Foreign Air Transport Operation Certificate (FAOC) through the Department of Civil Aviation, Brunei Darussalam.

In this respect, I have the honour to share that the necessary approval clearance process for PT Indonesia AirAsia's FOAC application has been concluded and approved. The Department of Civil Aviation of Brunei Darussalam will communicate with the applicant and Directorate of Air Transportation of the Republic of Indonesia on this outcome.

On this note, the Ministry of Transport and Infocommunications of Brunei Darussalam avails itself of this opportunity to renew its commitment to strengthening our close working relationship with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and at enhancing our air connectivity to facilitate business as well as people to people interactions between Brunei Darussalam and the Republic of Indonesia.


..12



-2-

Please accept, Excellency, the assurance of highest consideration.

Best regards,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shamhary', is written over a large, faint watermark that says 'KSPASIA'.

(Pengiran Dato Shamhary Mustapha)
Minister of Transport and Infocommunications
Brunei Darussalam

cc:

- Director General of Civil Aviation, Directorate of Air Transportation, Republic of Indonesia.
- Director, Department of Civil Aviation, Brunei Darussalam.



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024 Jakarta, 5 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 halaman
Hal : Undangan Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2023

Yang Terhormat,
(Daftar Nama Terlampir)
di Jakarta

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta penyampaian kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditangani selama tahun 2023, Komnas HAM RI akan menyelenggarakan kegiatan **“Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023”** dengan tema **“Menjawab Tantangan Baru dalam Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”**, disertai dengan **“Peringatan 31 Tahun Komnas HAM RI”**.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir secara daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB
Link Zoom : https://campsite.bio/peluncuran_laptah_kh_2023

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri. Sri Nur Fathya (██████████) dan Sdri. Mira Harti P. (██████████).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Atnike Nova Sigiro

Lampiran I Undangan
Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian dan Lembaga Lainnya

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Menteri Perdagangan
12. Menteri Perhubungan
13. Menteri Perindustrian
14. Menteri Pertanian
15. Menteri Pemuda dan Olahraga
16. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Komisi – Komisi dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

17. Kepala Lembaga Administrasi Negara
18. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
19. Kepala Badan Kepegawaian Negara
20. Kepala Badan Narkotika Nasional
21. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
24. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

25. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
26. Ketua Komisi Pemilihan Umum
27. Ketua Badan Pengawas Pemilu
28. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
29. Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
30. Kepala Badan Standardisasi Nasional
31. Kepala Perpustakaan Nasional
32. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
33. Kepala Badan Pusat Statistik
34. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
35. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
36. Kepala Badan Informasi Geospasial
37. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
38. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan
39. Kepala Badan Kepegawaian Negara
40. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
41. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
42. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
43. Kepala Badan Intelijen Negara
44. Kepala Badan Sertifikasi Elektronik
45. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
46. Direktur Utama Radio Republik Indonesia
47. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia
48. Kepala Badan Keamanan Laut
49. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
50. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha
51. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
52. Kepala Badan Pangan Nasional
53. Gubernur Bank Indonesia
54. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran I Undangan
Nomor : 040/PR.06.01/0.1.0/VI/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

SUSUNAN ACARA
PELUNCURAN LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM RI TAHUN 2023
“MENJAWAB TANTANGAN BARU DALAM PENGHORMATAN PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA”
Senin, 10 Juni 2024

Waktu (WIB)	Susunan Acara
08.00 - 09.00	Registrasi
09.00 - 09.10	Pembukaan oleh MC
09.10 - 09.15	Menyanyikan Indonesia Raya
09.15 - 09.20	Pembacaan Doa
09.20 - 09.30	Sambutan dan Pembukaan Ketua Komnas HAM
09.30 - 09.40	Video 31 tahun Komnas HAM
09.40 - 09.55	<i>Keynote Speech</i> oleh Menteri Luar Negeri RI
09.55 - 10.05	Video Laporan Tahunan Komnas HAM 2023
10.05 - 10.15	Penyampaian Capaian Komnas HAM 2023 oleh Ketua Komnas HAM
10.35 - 10.45	Tanggapan Narasumber atas Laporan Tahunan Komnas HAM 2023 <ul style="list-style-type: none">• Dr. iur Asmin Fransiska, S.H., L.L.M Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya• Ir. Yosep Adi Prasetyo Komisioner Komnas HAM Periode 2007-2012• Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi III DPR RI
10.35 - 10.45	Video Ucapan 31 Tahun Komnas HAM
10.45 - 11.45	Diskusi tentang Menjawab Tantangan Baru dalam Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dipandu oleh Moderator
11.45 - 11.55	Seremoni Potong Tumpeng
11.55 - 12.00	Penutupan

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Majalah Media Industri
Edisi 2024

Jakarta, 29 Mei 2024

Yth.
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Majalah Media Industri Edisi 2024 yang diterbitkan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian mengusung format digital (*E-Magazine*). Tema dari majalah ini adalah "Industri Ekspansif Negara Kompetitif". Pada tahun ini kami menerbitkan majalah versi digital yang dapat diakses melalui website Kemenperin dan akun Instagram **kemenperin_ri** pada tautan highlight. Adapun file *E-Magazine* dapat discan pada Kode QR terlampir dan diunduh melalui tautan <https://www.kemenperin.go.id/majalah/8/media-industri>.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Ronggolawe Sahuri

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

Daftar Tujuan Surat

- 1 Kepala Sekretariat Presiden
- 2 Kepala Sekretariat Wakil Presiden
- 3 Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
- 4 Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan RI
- 5 Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
- 6 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI
- 7 Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI
- 8 Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI
- 9 Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan RI
- 10 Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI
- 11 Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- 12 Staf Ahli Menteri Perdagangan RI
- 13 Staf Khusus Menteri Perdagangan RI

Kementerian/Lembaga

- 1 Ketua Komisi VII DPR-RI
- 2 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 3 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 4 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- 5 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 6 Menteri Dalam Negeri
- 7 Menteri Luar Negeri
- 8 Menteri Pertahanan
- 9 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 10 Menteri Keuangan
- 11 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 12 Menteri Pertanian
- 13 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 14 Menteri Perhubungan
- 15 Menteri Kelautan & Perikanan
- 16 Menteri Ketenagakerjaan

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 17 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 18 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 19 Menteri Kesehatan
- 20 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 21 Menteri Sosial
- 22 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 23 Menteri Pemuda & Olahraga
- 24 Menteri Komunikasi dan Informatika
- 25 Menteri Koperasi dan UKM
- 26 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 27 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 28 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS
- 29 Menteri Agraria dan Tata Ruang
- 30 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 31 Menteri Perdagangan
- 32 Menteri Agama
- 33 Menteri Sekretariat Negara
- 34 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
- 35 Menteri Investasi / Kepala BKPM
- 36 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- 37 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 38 Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN)
- 39 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)
- 40 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
- 41 Kepala Perpustakaan Nasional
- 42 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 43 Kepala Staf Kepresidenan

Gubernur

- 1 Gubernur Aceh
- 2 Gubernur Sumatera Utara
- 3 Gubernur Sumatera Barat
- 4 Gubernur Riau

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 5 Gubernur Jambi
- 6 Gubernur Sumatera Selatan
- 7 Gubernur Bengkulu
- 8 Gubernur Lampung
- 9 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- 10 Gubernur Kepulauan Riau
- 11 Gubernur DKI Jakarta
- 12 Gubernur Jawa Barat
- 13 Gubernur Jawa Tengah
- 14 Gubernur DI Yogyakarta
- 15 Gubernur Jawa Timur
- 16 Gubernur Banten
- 17 Gubernur Bali
- 18 Gubernur Nusa Tenggara Barat
- 19 Gubernur Nusa Tenggara Timur
- 20 Gubernur Kalimantan Barat
- 21 Gubernur Kalimantan Tengah
- 22 Gubernur Kalimantan Selatan
- 23 Gubernur Kalimantan Timur
- 24 Gubernur Kalimantan Utara
- 25 Gubernur Sulawesi Utara
- 26 Gubernur Sulawesi Tengah
- 27 Gubernur Sulawesi Selatan
- 28 Gubernur Sulawesi Tenggara
- 29 Gubernur Gorontalo
- 30 Gubernur Sulawesi Barat
- 31 Gubernur Maluku
- 32 Gubernur Maluku Utara
- 33 Gubernur Papua
- 34 Gubernur Papua Barat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 1 Kepala Dinas Perindagkop & UKM Provinsi NAD
- 2 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara
- 3 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat
- 4 Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Bengkulu

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 5 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
- 6 Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Lampung
- 7 Kepala Dinas Perindag Provinsi Riau
- 8 Kepala Dinas Perindag Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 9 Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi
- 10 Kepala Dinas Perindag Provinsi Kep. Riau
- 11 kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 12 Kepala Dinas Perindag Provinsi Banten
- 13 Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat
- 14 Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DI Yogyakarta
- 15 Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah
- 16 Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur
- 17 Kepala Dinas Perindag Provinsi Bali
- 18 Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Tengah
- 19 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
- 20 Kepala Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Timur
- 21 Kepala Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat
- 22 Kepala Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara
- 23 Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo
- 24 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan
- 25 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara
- 26 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara
- 27 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat
- 28 Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah
- 29 Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku
- 30 Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua
- 31 Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 32 Kepala Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 33 Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara
- 34 Kepala Dinas Perindag Provinsi Papua Barat

Universitas

- 1 Rektor Institut Pertanian Bogor
- 2 Rektor Institut Teknologi Bandung
- 3 Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 4 Rektor Telkom University
- 5 Rektor Universitas Airlangga
- 6 Rektor Universitas Andalas
- 7 Rektor Universitas Bangka Belitung
- 8 Rektor Universitas Bengkulu
- 9 Rektor Universitas Borneo Tarakan
- 10 Rektor Universitas Brawijaya
- 11 Rektor Universitas Cenderawasih
- 12 Rektor Universitas Diponegoro
- 13 Rektor Universitas Gadjah Mada
- 14 Rektor Universitas Haluoleo
- 15 Rektor Universitas Hasanuddin
- 16 Rektor Universitas Indonesia
- 17 Rektor Universitas Jambi
- 18 Rektor Universitas Jember
- 19 Rektor Universitas Jenderal Soedirman
- 20 Rektor Universitas Khairun
- 21 Rektor Universitas Lambung Mangkurat
- 22 Rektor Universitas Lampung
- 23 Rektor Universitas Malikussaleh
- 24 Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
- 25 Rektor Universitas Mataram
- 26 Rektor Universitas Mulawarman
- 27 Rektor Universitas Musamus Merauke
- 28 Rektor Universitas Negeri Gorontalo
- 29 Rektor Universitas Negeri Jakarta
- 30 Rektor Universitas Negeri Makassar
- 31 Rektor Universitas Negeri Malang
- 32 Rektor Universitas Negeri Manado
- 33 Rektor Universitas Negeri Medan
- 34 Rektor Universitas Negeri Padang
- 35 Rektor Universitas Negeri Papua
- 36 Rektor Universitas Negeri Semarang
- 37 Rektor Universitas Negeri Surabaya
- 38 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 39 Rektor Universitas Nusa Cendana
- 40 Rektor Universitas Padjadjaran
- 41 Rektor Universitas Palangkaraya
- 42 Rektor Universitas Pattimura
- 43 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
- 44 Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- 45 Rektor Universitas Riau
- 46 Rektor Universitas Sam Ratulangi
- 47 Rektor Universitas Sebelas Maret
- 48 Rektor Universitas Sriwijaya
- 49 Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- 50 Rektor Universitas Sumatera Utara
- 51 Rektor Universitas Syiah Kuala
- 52 Rektor Universitas Tadulako
- 53 Rektor Universitas Tanjungpura
- 54 Rektor Universitas Teknologi Sumbawa
- 55 Rektor Universitas Terbuka
- 56 Rektor Universitas Trisakti
- 57 Rektor Universitas Trunojoyo Madura
- 58 Rektor Universitas Udayana
- 59 Ketua Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI)
- 60 Kepala UPT Perpustakaan Universitas Sulawesi Barat
- 61 B. Laksito Purnomo (Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Asosiasi

- 1 Ketua Umum Kadin Indonesia
- 2 Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
- 3 Ketua Ikatan Perusahaan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO)
- 4 Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)
- 5 Ketua Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia (GAPIPA)
- 6 Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo)
- 7 Pengurus Gabungan Pengusaha Jamu
- 8 Direktur Rumah Kepemimpinan PPSDMS Nurul Fikri
- 9 Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 10 Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
- 11 Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)
- 12 Ketua Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
- 13 Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
- 14 Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI)

Kawasan Industri

- 1 Pengelola Kawasan Industri Aceh - Ladong PT. Pembangunan Aceh
- 2 Pengelola Bintan Inti Industrial Estate PT. Bintan Inti Industrial Estate
- 3 Pengelola Kawasan Industri Wiraraja PT. Wiraraja Indonesia
- 4 Pengelola Batamindo Industrial Park PT Batamindo Investment Cakrawala
- 5 Pengelola Panbil Industrial Estate PT. Nusatama Properta Panbil
- 6 Pengelola Bintang Industrial Park II PT. Bintang Propertindo
- 7 Pengelola Latrade Industrial Park PT. Latrade Batam Indonesia
- 8 Pengelola Puri Industrial Park 2000 PT. Teluk Pantaian Indah
- 9 Pengelola Tunas Industrial Estate PT. Tritunas Bangun Perkasa
- 10 Pengelola Union Industrial Park PT. Union Batam Abadi
- 11 Pengelola Kabil Integrated Industrial Park PT. Kabil Indonusa Estate
- 12 Pengelola West Point Batam Industrial Park PT. Batam Sentralindo
- 13 Pengelola Executive Industrial Park I PT. Bumi Abadi Tegar Sakti
- 14 Pengelola Executive Industrial Park II PT. Bumi Abadi Tegar Sakti
- 15 Pengelola Sarana Industrial Point PT. Pertama Sarana Unggulan
- 16 Pengelola Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi PT Sekupang Makmur Abadi
- 17 Pengelola Cammo Industrial Park PT. Amansejati Propertindo
- 18 Pengelola Citra Buana Industrial Park I, II & III PT. Citra Buana Prakarsa
- 19 Pengelola Hijrah Industrial Park PT Hijrah Karya Mandiri
- 20 Pengelola Indah Industrial Park
- 21 Pengelola Kara Industrial Park PT Kara Primanusa
- 22 Pengelola Kawasan Industri Malindo Cipta Perkasa PT. Malindo Cipta Perkasa
- 23 Pengelola Mega Cipta Industrial Park PT. Mega Cipta Adi Persada
- 24 Pengelola Taiwan International Park PT. Sigma United Internasional
- 25 Pengelola Bintang Industrial Park I PT. Bintang Propertindo
- 26 Pengelola Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 27 Pengelola Kawasan Berikat Nusantara PT. Kawasan Berikat Nusantara
- 28 Pengelola Kawasan Industri Terpadu Indonesia China PT. kawasan industri terpadu indonesia china
- 29 Pengelola Bekasi International Industrial Estate PT. Hyundai Inti Development
- 30 Pengelola MM2100 Industrial Town BFIE PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
- 31 Pengelola MM2100 Industrial Town MMID PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev.
- 32 Pengelola Kawasan Industri Jababeka PT. Jababeka Infrastruktur
- 33 Pengelola East Jakarta Industrial Park PT East Jakarta Industrial Park
- 34 Pengelola Kawasan Industri Gobel PT. Gobel Dharma Nusantara
- 35 Pengelola Kawasan Industri Marunda Center PT. Tegar Primajaya & PT. Multikarya Hasilprima
- 36 Pengelola Greenland International Industrial Center (GIIC) PT. Puradelta Lestari & PT. Pembangunan Deltamas
- 37 Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang PT. Lippo Cikarang Tbk
- 38 Pengelola Cibinong Center Industrial Estate PT. Cibinong Center Industrial Estate
- 39 Pengelola Kawasan Industri Sentul PT. Bogorindo Cemerlang
- 40 Pengelola Kawasan Industri Indotaisei PT. Indotaisei Indah Development
- 41 Pengelola Kawasan Industri Kujang Cikampek PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek
- 42 Pengelola Kawasan Industri Mitrakarawang PT. Mitra Karawang Jaya
- 43 Pengelola Karawang International Industrial City PT. Maligi Permata Industrial Estate
- 44 Pengelola Suryacipta City Of Industry PT. Suryacipta Swadaya
- 45 Pengelola Kawasan Industri Artha Industrial Hill PT. Bumi Anugerah Makmur
- 46 Pengelola Kawasan Industri GT Tech Park PT. Bintang Puspita Dwikarya
- 47 Pengelola Karawang New Industry City PT. CFLD Karawang New Industry City Development
- 48 Pengelola Kawasan Industri Pertiwi Lestari PT. pertiwi lestari
- 49 Pengelola Karawang Jabar Industrial Estate PT. Karawang Jabar Industrial Estate
- 50 Pengelola Kertajati Industrial Estate Majalengka PT. Dwipapuri Abadi
- 51 Pengelola Kota Bukit Indah Industrial City PT. Besland Pertiwi
- 52 Pengelola kawasan industri lion PT. Singa Purwakarta Jaya
- 53 Pengelola Kawasan Industri SKI PT. Sumber Karja International
- 54 Pengelola Suryacipta Industrial Estate Subang PT Suryacipta Swadaya
- 55 Pengelola Kawasan Industri Sukabumi PT. Bogorindo Cemerlang
- 56 Pengelola Kawasan Industri Rancaekek PT. Dwipapuri Abadi

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 57 Pengelola Kawasan Industri Cilacap PD Kawasan Industri Cilacap
- 58 Pengelola Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung PT. Jawa Tengah Lahan Andalan
- 59 Pengelola Kawasan Industri Kendal PT. Kawasan Industri Kendal
- 60 Pengelola Kawasan Industri Wijayakusuma PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
- 61 Pengelola Tanjung Emas Export Processing Zone PT. Lamicitra Nusantara Tbk
- 62 Pengelola BSB Industrial Park PT. Karyadeka Alam Lestari
- 63 Pengelola Kawasan Industri Terboyo Semarang PT. Merdeka Wirastama
- 64 Pengelola Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park PT. Yogyakarta Isti Parama
- 65 Pengelola Kawasan Industri Gresik PT. kawasan industri gresik
- 66 Pengelola Maspion Industrial Estate PT. Maspion Industrial Estate
- 67 Pengelola Java Integrated Industrial and Port Estate PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
- 68 Pengelola Ngoro Industrial Park PT Intiland Sejahtera
- 69 Pengelola Pasuruan Industrial Estate Rembang PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER)
- 70 Pengelola Sidoarjo Industrial Estate Berbek PT. Surabaya Industrial Estate
- 71 Pengelola Kawasan Industri SiRIE PT Bhumi Kencana Sejahtera
- 72 Pengelola Kawasan Industri Tuban PT Kawasan Industri Gresik
- 73 Pengelola Kawasan Industri Safe N Lock PT. Makmur Berkah Ananda
- 74 Pengelola Surabaya Industrial Estate Rungkut PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER)
- 75 Pengelola Kawasan Industri Nikomas Gemilang PT. Nikomas Gemilang
- 76 Pengelola Modern Cikande Industrial Estate PT Modern Industrial Estate
- 77 Pengelola Kawasan Industri SBS PT. Sukses Bina Makmur
- 78 Pengelola Kawasan Industri Terpadu Wilmar PT. Kawasan Industri Terpadu Wilmar
- 79 Pengelola Millennium Industrial Estate PT Bumi Citra Permai
- 80 Pengelola Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas PT Mitratangerang Bhumimas
- 81 Pengelola Griya Idola Industrial Park PT. jabar utama wood industry
- 82 Pengelola Kawasan Industri Sumber Rezeki PT. Irama Gemilang Lestari
- 83 Pengelola Kawasan Industri Panca Puri PT.pancapuri
- 84 Pengelola Krakatau Industrial Estate Cilegon PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 85 Pengelola Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD PT Bumi Serpong Damai
- 86 Pengelola Medanstar Industrial Estate PT. Tamoratama Prakarsa
- 87 Pengelola Kawasan Industri Medan PT. Kawasan Industri Medan (Persero)
- 88 Pengelola Kawasan Industri Sei Mangkei PT. KINRA
- 89 Pengelola Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestry
- 90 Pengelola Kawasan Industri KBS PT. Ketapang Bangun Sarana (PT.KBS)
- 91 Pengelola Kawasan Industri Batu Licin Perusda Batulicin Jaya Utama
- 92 Pengelola Kawasan Industri Kariangau PT Kawasan Industri Kariangau/PERUSDA Melati Bhakti Satya
- 93 Pengelola Kaltim Industrial Estate PT. Kaltim Industrial Estate
- 94 Pengelola Kawasan Industri VDNI PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park
- 95 Pengelola Kawasan Industri Morowali PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
- 96 Pengelola Kawasan Industri Stardust PT Stardust Estate Investment
- 97 Pengelola Kawasan Industri Palu PT Bangun Palu Sulteng
- 98 Pengelola Kawasan Industri Makasar PT. KIMA
- 99 Pengelola Padang Industrial Park PT. Padang Industrial Park
- 100 Pengelola kawasan industri teluk weda PT Indonesia Wedabay Industrial Park
- 101 Pengelola Kawasan Industri EFI PT. Emerald Ferrochromium Industry
- 102 Pengelola Kawasan industri Tanjung Buton PT. Kawasan Industri Tanjung Buton
- 103 Pengelola Kawasan Industri Dumai PT. Kawasan Industri Dumai
- 104 Pengelola Kawasan Industri Lampung PT. Kawasan Industri Lampung
- 105 Pengelola KI Waylaga Bizpark PT. Griya Lestari Jaya
- 106 Pengelola Kawasan Industri Sadai PT. Ration Bangka Abadi

Perusahaan

- 1 Direktur Utama PT PLN
- 2 Direktur Utama PT Aneka Tambang
- 3 Direktur Utama PT Semen Baturaja
- 4 Direktur Utama PT Semen Kupang
- 5 Direktur Utama PT Barata Indonesia
- 6 Direktur Utama PT Boma Bisma Indra
- 7 Direktur Utama PT Dahana
- 8 Direktur Utama PT KAI (Kereta Api Indonesia)

Lampiran I

Nomor : B/884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

- 9 Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia
- 10 Direktur Utama PT Krakatau Steel
- 11 Direktur Utama PT LEN Industri
- 12 Direktur Utama PT Pindad
- 13 Direktur Utama PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
- 14 Direktur Utama PT Semen Padang
- 15 Direktur Utama PT Semen Tonasa
- 16 Direktur Utama PT Agrindo
- 17 Direktur Utama PT Astra Daihatsu Motor
- 18 Direktur Utama PT Toyota Astra Motor
- 19 Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia
- 20 Direktur Utama PT Bakrie Autoparts
- 21 Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)
- 22 Direktur Utama PT Pan Brothers
- 23 Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
- 24 Pimpinan Dewan Energi Nasional
- 25 Direktur Utama PT Suzuki Indomobil Motor
- 26 Kepala Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)
- 27 Adis Dimension Footwear
- 28 Perusahaan Gas Negara
- 29 Aneka Gas Industri
- 30 Daya Radar Utama
- 31 Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
- 32 Direktur Utama PT. SHARP Electronics Indonesia
- 33 Direktur Utama PT. SGMW Motor Indonesia (Wuling)
- 34 Direktur Utama PT. Triangle Motorindo (VIAR)
- 35 Direktur Utama PT. Tetra Pak Indonesia
- 36 Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Ronggolawe Sahuri

Lampiran II

Nomor : 884/SJ-IND.5/HM/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

Kode QR Majalah Media Industri 2024



<https://www.kemenperin.go.id/majalah/8/media-industri>

Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Ronggolawe Sahuri



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Tel./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

Nomor : B-981/DJAI.6/AI.05.01/07/2024

Jakarta, 22 Juli 2024

Lamp. : 1 (satu) berkas

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Pengisian Formulir Laporan Dugaan Kebocoran Data Pribadi

Kepada Yth.

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

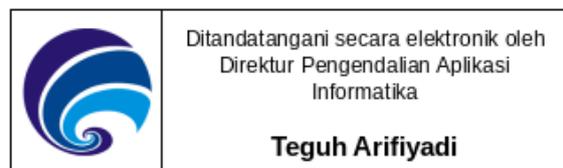
di Tempat

Menindaklanjuti informasi mengenai kemungkinan adanya dugaan insiden kebocoran data pribadi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditjen Hubud Kemenhub) sesuai pada tautan <https://breachforums.st/Thread-DATABASE-Repot-HUBUD-DEPHUB-GO-ID-Directorate-General-of-Air-Transportation-INDONESIA>, maka sesuai dengan ketentuan pemrosesan data pribadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, kami bermaksud meminta klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut dan meminta Ditjen Hubud Kemenhub untuk mengisi Formulir Laporan Dugaan Kebocoran Data Pribadi (format terlampir).

Formulir yang telah diisi tersebut kami klasifikasikan sebagai dokumen rahasia, harap dilengkapi dengan *password* dan dikirim secepatnya melalui *email* pengendalianaptika@kominfo.go.id sedangkan *password* dikirimkan secara terpisah melalui WhatsApp: ██████████ selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak surat diterima.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

2. Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www. blitarkab.go.id

Blitar, 22 Juli 2024

Nomor : B/555.03.01.02/483/409.23.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Video Ucapan Hari Jadi
Kabupaten Blitar ke-700 Tahun

Kepada
Yth. Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
di -
TEMPAT

Dalam rangka Hari Jadi Blitar ke- 700 yang diperingati tanggal 5 Agustus 2024, tahun ini mengambil tema "**Kabupaten Blitar Maju dan Sejahtera**". Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkenan memberikan ucapan Hari Jadi Blitar ke- 700 dalam bentuk video singkat berdurasi 1 (satu) menit. Video ucapan tersebut akan kami tayangkan saat peringatan puncak Hari Jadi Blitar ke- 700 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dan diposting pada Media Sosial Pemerintah Kabupaten Blitar.

Video tersebut dapat dikirim melalui link google drive ke email: pemkab.blitar@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Rezza D. Lathanza dengan nomor telepon [REDACTED]

Demikian permohonan kami, atas ketersediaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 196506031990021002